



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

BBRPPBKP TAHUN 2025



Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

LAPORAN KINERJA (LKj) BBRP2BKP TAHUN 2025



**BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Cica Sugiarti

Plt. Kepala Balai Besar Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan

Kepala Sub Bagian Umum

Zilfia Nora

Anggota

Langgeng Nurdiansah
Faisal Amin
Tati Nurhayati
Nur Fadlu Fauziah
Alfan Faisal
Ahmad Affandi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

LKj BBRP2BKP Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BBRP2BKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu juga untuk sarana melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja BBRP2BKP.

LKj ini menguraikan rencana kerja BBRP2BKP beserta analisis capaiannya selama Tahun 2025. Target kinerja BBRP2BKP yang ditetapkan pada Tahun 2025 telah tercapai semua yang menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan keterangan "**Istimewa**". Hal ini akan menjadi bahan acuan untuk mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2026.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukannya untuk penyempurnaan laporan ini. Semoga LKj Tahun 2025 ini bermanfaat untuk umpan balik bagi seluruh pegawai BBRP2BKP dalam meningkatkan kinerja pada tahun 2026.

Jakarta, 19 Januari 2026
Plt. Kepala BBRP2BKP

Cica Sugiarti

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
I. PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan	8
1.3 Tugas dan Fungsi.....	9
1.4 Keragaan SDM	11
1.5 Potensi dan Permasalahan	15
1.6 Sistematika Laporan Kinerja	17
II. PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Rencana Strategis.....	20
2.2. Sasaran Kegiatan	22
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT).....	24
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
2.5 Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	31
III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Prestasi Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025.....	33
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	35
3.3 Akuntabilitas Keuangan BBRP2BKP Tahun 2025.....	76
3.4 Efisiensi Anggaran dan/atau Alokasi Sumber Daya BBRP2BKP Tahun 2025.....	78

3.5 Capaian Kinerja Lainnya	85
IV. PENUTUP	94
4.1 Capaian Indikator Kinerja.....	94
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	95
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	10
Gambar 2.	Keragaan pegawai BBRP2BKP Pada Akhir Tahun 2025.....	11
Gambar 3.	<i>Dashboard</i> Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025	34
Gambar 4.	Rapat internal tim keuangan dan umum	40
Gambar 5.	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP Tahun 2025	42
Gambar 6.	Rapat Revisi Anggaran BBRP2BKP TA 2025	43
Gambar 7.	Revisi Halaman III DIPA TA 2025	43
Gambar 8.	Penginputan pada aplikasi SAKTI.....	44
Gambar 9.	Koordinasi Tim Keuangan terkait Laporan Hasil Penilaian PIPK UAKPA	44
Gambar 10.	Pemutakhiran KPA untuk revisi DIPA	45
Gambar 11.	<i>Kick Off Meeting</i> dan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPSDMKP Tahun 2025	48
Gambar 12.	Penyampaian sasaran dan indikator kinerja KKP, BPPSDMKP dan indikator kinerja BBRP2BKP 2025	49
Gambar 13.	Cascading IKU dan Penyusunan Rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	49
Gambar 14.	Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Lingkup BPPSDMKP	50
Gambar 15.	Rapat Sosialisasi PerMenKP No 2 Tahun 2025	50
Gambar 16.	Rapat Persiapan Pelaksanaan SAKIP	51
Gambar 17.	Pelatihan SAKIP Tahun 2025	51
Gambar 18.	Rapat Verifikasi Data Dukung TW III Tahun 2025	51
Gambar 19.	Rapat penyusunan rancangan Renstra BPPSDMKP.	52
Gambar 20.	Rapat lanjutan finalisasi penyusunan Rentsra BPPSDMKP.....	52
Gambar 21.	BBRPPBKP berhasil meraih Peringkat ke-2 Evaluasi AKIP Level II	53
Gambar 22.	Progress Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP	56

Gambar 23. Nilai Capaian IP ASN BBRPPBKP	59
Gambar 24. Rapat koordinasi terkait kepegawaian.....	60
Gambar 25. Koordinasi terkait monitoring pengisian sasaran kinerja pegawai (SKP) periode I 2025	61
Gambar 26. Penginputan diklat pegawai pada aplikasi MyASN.....	61
Gambar 27. Monitoring data IP ASN.	62
Gambar 28. Perhitungan efisiensi anggaran pasca terbitnya peraturan Menteri Kemenkeu RI perihal Efisiensi Belanja Kementerian TA. 2025.....	65
Gambar 29. Pembahasan anggaran gedung dan bangunan.	69
Gambar 30. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Umum dan Data Rekapitulasi IK "Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)" Tahun 2025.....	72
Gambar 31. Bukti Dukung Capaian IK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	74
Gambar 32. Rapat Koordinasi Kegiatan BBRP2BKP	75
Gambar 33. Kegiatan PTB <i>Batch</i> 2 di BBRP2BKP.....	87
Gambar 34. Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	87
Gambar 35. Peserta sedang praktik membuat brownies tulang ikan lele	89
Gambar 36. Rancangan desain kemasan produk olahan ikan.....	90
Gambar 37. Penerimaan Penghargaan Peringkat ke-2 Evaluasi AKIP Level II di lingkungan BPPSDMKP	91
Gambar 38. Penerimaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif	92
Gambar 39. Hasil Penilaian Arsiparis Lingkup KKP	92
Gambar 40. Dashboard Kinerjaku BBRP2KP Tahun 2025	94

DAFTAR TABEL

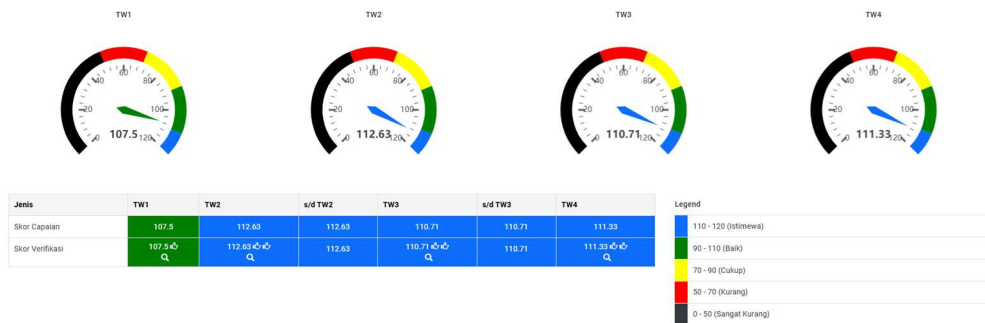
Tabel 1.	Daftar pegawai BBRP2BKP yang telah dimutasi ke Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP.....	12
Tabel 2.	Jumlah pegawai ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	14
Tabel 3.	Perkembangan Revisi Anggaran BBRP2BKP Tahun 2025.	24
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025	30
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025	36
Tabel 6.	Capaian IK 1	38
Tabel 7.	Capaian IK 2	41
Tabel 8.	Capaian IK 3	46
Tabel 9.	Capaian IK 4	55
Tabel 10.	Capaian IK 5	58
Tabel 11.	Capaian IK 6	63
Tabel 12.	Capaian IK 7	67
Tabel 13.	Capaian IK 8	71
Tabel 14.	Realisasi Anggaran BBRP2BKP Tahun 2025	76
Tabel 15.	Realisasi Anggaran per-Indikator Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025.....	77
Tabel 16.	Perhitungan Efisiensi Anggaran BBRP2BKP Tahun 2025....	80
Tabel 17.	Data Terpilah Gender Peserta Pelatihan.....	88

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran capaian kinerja BBRP2BKP Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Produksi Garam, Peraturan Menteri KP Nomor 71 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian dalam ketentuan peralihan yaitu pada pasal 24 ayat (1) diatur bahwa pejabat dan pegawai BBRP2BKP tetap melaksanakan tugas dan fungsinya pada BPPSDMKP sampai ditetapkan jabatan baru, dan seluruh aset, anggaran, serta dokumen dialihkan menjadi milik BPPSDMKP. Adapun penetapan jabatan baru dilaksanakan paling lambat enam bulan sejak peraturan tersebut diundangkan pada 31 Oktober 2025 yaitu pada bulan April tahun 2026.

Pada Tahun 2025, BBRP2BKP telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan dan 8 Indikator Kinerja (IK). Pengukuran capaian kinerja BBRP2BKP Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan capaian kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar **111,33 (ISTIMEWA)** sebagaimana dashboard Kinerjaku berikut:



Dashboard Kinerjaku Level 2 BBRP2BKP

Pada Tahun 2025, dari 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), seluruhnya memiliki capaian kinerja. Adapun rincian target dan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

1. IK 1 "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRP2BKP (%)", dengan target 85 dan capaian sebesar 85 dengan persentase capaian sebesar 100%.
2. IK 2 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)", dengan target 92 dan capaian sebesar 98,57 dengan persentase capaian sebesar 107,14%
3. IK 3 "Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)", dengan target 82 dan capaian sebesar 84,00 dengan persentase capaian sebesar 102,44%
4. IK 4 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)", dengan target sebesar 71,50 dan capaian sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%
5. IK 5 "Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)", dengan target sebesar 85,00 dengan capaian sebesar 88,49 dengan persentase capaian sebesar 104,11%
6. IK 6 "Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)" dengan target 80 dan capaian sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%.

7. IK 7 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)”, dengan target sebesar 80,00 dan capaian sebesar 97,50 dengan persentase capaian sebesar 120%
8. IK 8 “Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)”, dengan target 100 dan capaian sebesar 121,43 dengan persentase capaian sebesar 120%.

Matriks capaian Indikator Kinerja BBRP2BKP pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target/Capaian			Keterangan
				Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)	85	85	100	
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	92	98,57	107,14	
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)	82	84	102,44	
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	71,50	100	120	
		5	Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	85	88,49	104,11	
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)	80	100	120	
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)	80	97,50	120	
		8	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	100	121,43	120	

Warna	Keterangan
	Istimewa (nilai 110 - 120)
	Baik (nilai 90 - <110)
	Cukup (nilai 70 - < 90)

	Kurang (nilai 50 - < 70)
	Sangat Kurang (nilai <50)
	Belum ada penilaian

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id/>

Secara umum capaian kinerja BBRP2BKP pada Tahun 2025 memiliki kategori/status **“Istimewa”**. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja BBRP2BKP pada Tahun 2025 yaitu melakukan pemantauan capaian kinerja BBRP2BKP secara berkala guna memastikan bahwa capaian indikator kinerja tersebut dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan berdasarkan bukti-bukti data pendukung yang valid.

Pada aspek pemanfaatan, hasil evaluasi dan rekomendasi dalam LKJ telah ditindaklanjuti secara sistematis melalui penyusunan Rencana Aksi tahun berikutnya, disertai revisi dan optimalisasi anggaran guna memastikan implementasinya berjalan efektif. Rekomendasi tersebut juga diintegrasikan ke dalam RKAKL dan Renja serta, apabila diperlukan, dilakukan penyesuaian pada Renstra untuk menjamin kesinambungan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, capaian kinerja dimanfaatkan sebagai bahan dalam Dialog Kinerja Organisasi Semester I dan evaluasi berkala, serta dikomunikasikan melalui Forum Apel Pagi sebagai bagian dari penguatan budaya kinerja dan peningkatan akuntabilitas organisasi.

Pagu anggaran BBRP2BKP pada tahun 2025 sebesar Rp13.038.100.000- dengan realisasi sebesar Rp12.297.682.111,- (99.50%). Realisasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6.810.794.141,- (99.07%) dan belanja barang sebesar Rp6.161.888.072,- (99.98%).

Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan layanan dukungan manajemen internal (layanan umum, layanan

perkantoran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor, serta layanan manajemen keuangan).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja negara. Muara dari tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, dan memberikan dampak serta manfaat dari hasil yang diperoleh.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja BBRP2BKP atas pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran yang menguraikan dan memuat capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Acuan dalam penyusunan LKj BBRP2BKP Tahun 2025 antara lain, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Pada tanggal 29 Oktober 2025 telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Produksi Garam. Dengan berlakunya peraturan tersebut di atas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian pada BAB IX Ketentuan Peralihan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2025 yaitu pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa pada saat Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku:

- a. Pejabat dan pegawai pada BBRP2BKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2020, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sampai dengan ditetapkannya jabatan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Aset, anggaran, dan dokumen pada BBRP2BKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2020, dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan pada Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa penetapan jabatan baru sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2025 ini diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2025.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BBRP2BKP masih berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Sebagai salah satu Unit Kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, BBRP2BKP pada awal Tahun 2025 telah menetapkan perencanaan kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pengukuran capaian kinerja, serta menyusun LKj BBRP2BKP secara berkala setiap Triwulan pada 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan LKj BBRP2BKP Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja BBRP2BKP yang telah dan seharusnya dicapai pada Tahun 2025;

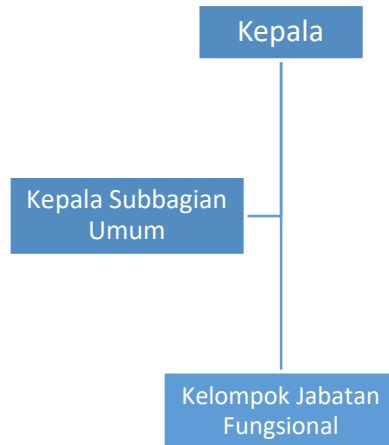
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBRP2BKP untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun 2026.

1.3 Tugas dan Fungsi

BBRP2BKP mempunyai tugas melaksanakan riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBRP2BKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan dibidang keamanan pangan, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis bioteknologi, peningkatan kualitas dan nilai tambah, serta sistem, model, dan kebijakan teknis industri pengolahan perikanan;
- c. Pengembangan teknologi pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;
- d. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
- e. Pengelolaan prasarana dan sarana; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dikarenakan fungsi riset sudah menjadi kewenangan BRIN maka BBRP2BKP hanya melaksanakan kegiatan dan anggaran dukungan manajemen saja. Susunan organisasi BBRP2BKP terdiri atas Kepala, Subbagian Umum, dan Jabatan Fungsional. Struktur organisasi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Tugas dari masing-masing Subbagian serta Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4 Keragaan SDM

Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan berdasarkan status kepegawaian disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan pegawai BBRP2BKP Pada Akhir Tahun 2025

Jumlah pegawai BBRP2BKP hingga akhir Tahun 2025 tercatat sebanyak 42 orang, terdiri atas 23 pegawai (55%) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 pegawai (45%) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan jenis kelamin, pegawai tersebut terdiri dari 20 laki-laki dan 22 perempuan.

Selama tahun 2025 telah terjadi perubahan jumlah pegawai di BBRP2BKP. Pada tanggal 1 Mei 2025, jumlah PNS di BBRP2BKP berkurang satu orang, yaitu Syamdidi, S.Pi., M.App.Sc. (Pembina, IV/a), yang per 1

Mei 2025 telah dipindahkan ke Pusat Kebijakan Strategis, Sekretariat Jenderal, dalam jabatan Instruktur Ahli Madya, sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 97/MEN-SJ/KP.431/IV/2025. Selanjutnya, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025, sebanyak 19 (sembilan belas) PNS telah dimutasi ke Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Surat Plh. Sekretaris BPPSDM Nomor B.3895/BPPSDM.1/KP.430/V/2025 tanggal 23 Mei 2025. Adapun daftar pegawai yang dimutasi ke Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar pegawai BBRP2BKP yang telah dimutasi ke Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP

No	Nama Pegawai	NIP	Pangkat/Gol
1	Bagus Hendrajana, ST, M.Sc	19710503 200604 1 005	Pembina, IV/a
2	Ir. Pujoyuwono Martosuyono, M.Si	19700526 199403 1 001	Pembina, IV/a
3	Diini Fithriani, S.Tp., M.Si	19800316 200312 2 004	Pembina, IV/a
4	Arifah Kusmarwati, S.Pi, M.Sc	19730306 200003 2 006	Pembina, IV/a
5	Riezky Darmawan Bayu Wijaya, S.IAN	19870512 201012 1 003	Penata Tk.I, III/d
6	Yusma Yennie, S.Pi, M.Si	19740224 199903 2 002	Penata Tk.I, III/d
7	Dr. Suryanti, S.Pi, M.Si	19750118 200112 2 001	Penata Tk.I, III/d
8	Dr. Ema Hastarini, MP	19730820 200212 2 001	Penata Tk.I, III/d
9	Devi Ambarwaty Oktavia, ST.MP	19781017 200312 2 003	Penata Tk.I, III/d
10	Diah Lestari Ayudiarti, S.Si, M.Si	19810315 200312 2 003	Penata Tk.I, III/d
11	Anisa Fathir Rahman, S.Pi	19870809 201001 2 025	Penata Tk.I, III/d
12	Fairdiana Andayani, S.St.Pi	19680710 199403 2 005	Penata, III/c
13	Novi Thoriquin Naja	19821121 200910 1 001	Pengatur, II/c
14	Dr. Muhamad Darmawan, S.Pi, MT, M.Sc	19790422 200212 1 003	Pembina Tk.I, IV/b
15	Delima Agustina, S.St.Pi	19820825 200701 2 001	Penata Tk.I, III/d
16	Merissa Nur Asih, S.Ikom	19830518 200701 2 001	Penata, III/c
17	Ade Fitri Amalia, A.Md	19820730 200910 2 001	Penata Muda Tk.I, III/b
18	Erki Herdian, A.Md	19821211 200811 1 001	Penata Muda, III/a
19	Mohammad Akhirudin	19800831 200701 1 001	Pengatur Tk.I, II/d

Sumber: Surat Plh. Sekretaris BPPSDM Surat Plh. Sekretaris BPPSDM Nomor B.3895/BPPSDM.1/KP.430/V/2025

Pada tanggal 8 Agustus 2025 ada satu orang PNS BBRP2BKP yaitu Dimas Gondomarto Kusuma, S.E., M.AP. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda) dilantik menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha di Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/MEN-SJ/KP.430/VIII/2025 dan satu orang PNS lagi yaitu Zilfia Nora, S.Pi., M.Si (Perencana Ahli Muda) dilantik menjadi Kepala Subbagian Umum di Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan.

Pada bulan Oktober 2025 sebanyak 15 orang yang sebelumnya berstatus sebagai PPNPN telah diangkat menjadi PPPK. Hal ini berdasarkan surat pengumuman Ketua Panitia Pengadaan CASN KKP Tahun Anggaran 2024 Nomor B.972/SJ/KP.320/IX/2024 tanggal 28 September 2025 Tentang Pemanggilan Mulai Melaksanakan Tugas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Khusus dan Tenaga Kesehatan Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024. Pada bulan Oktober 2025, 3 orang pegawai BBRP2BP yang berstatus sebagai PJLP telah diangkat menjadi PPPK sebanyak 2 orang dengan lokasi penempatan di BBRP2BKP sebanyak 1 orang dan di Sekretariat BPPSDMKP sebanyak 1 orang. Sedang 1 orang PJLP lagi sudah tidak di kontrak lagi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai PJLP paruh waktu. Hingga akhir tahun 2025 terdapat 4 (empat) orang yang berstatus PPPK dari BBRP2BKP yang ditugaskan di Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yaitu Lidia Dinawati, S.Pi, Franciscus Edi Priyono, S.Pi, Rizky Fauziyah Sholihah, S.T.P, dan Ade Kurniawati.

Jenjang pendidikan pegawai yang berstatus ASN yaitu S2 sebanyak 9 orang (21%), S1 sebanyak 16 orang (38%), Diploma sebanyak 7 orang (17%), SLTA sebanyak 9 orang (21%), dan SLTP 1 orang

(2%). Pegawai ASN BBRP2BKP memangku Struktural 1 orang (Kasubag Umum), 41 orang memangku Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum.

Tabel 2. Jumlah pegawai ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Subbagian Umum	1
2	Instruktur Muda	3
3	Instruktur Pertama	2
4	Pustakawan Ahli Muda	1
5	Arsiparis Ahli Pertama	1
6	Perencana Ahli Madya	1
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
8	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
9	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
10	Pranata Komputer Pertama	1
11	Pranata Komputer Terampil	1
12	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
13	Penata Layanan Operasional	12
14	Pengelola Layanan Operasional	2
15	Pengadministrasian Layanan Operasional	2
16	Jabatan Fungsional Umum	11
Total		42

Sumber: Data Kepegawaian BBRP2BKP

Salah satu Indikator Kinerja (IK) terkait dengan SDM adalah IP ASN. Capaian IK IP ASN BBRP2BKP sampai dengan akhir Desember tahun 2025 sebesar **88,49** (tinggi) sesuai dengan website [LKj BBRP2BKP Tahun 2025](#) | 14

<https://ipasn.sdmao.id/ip-asn/2025/> nilai ini lebih tinggi dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 85.

1.5 Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki oleh BBRP2BKP yaitu:

- a. Hingga akhir tahun 2025, BBRP2BKP memiliki pegawai sebanyak 42 orang yang terdiri dari 23 pegawai (55%) berstatus PNS dan 19 pegawai (45%) berstatus PPPK. Jenjang pendidikan pegawai yang berstatus ASN yaitu S2 sebanyak 9 orang (21%), S1 sebanyak 16 orang (38%), Diploma sebanyak 7 orang (17%), SLTA sebanyak 9 orang (21%), dan SLTP 1 orang (2%). Pegawai ASN BBRP2BKP memangku Struktural 1 orang (Kasubag Umum), 41 orang memangku Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum.
- b. Tersedianya anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) yang tertuang dalam DIPA BBRP2BKP Tahun 2025 untuk pelaksanaan Program Dukungan Manajemen;
- c. Memiliki prasarana berupa tanah serta gedung/bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan manajerial, olah raga serta sarana berupa peralatan dan mesin untuk kegiatan operasional kantor dan Laboratorium;
- d. Terjalannya koordinasi, sinergi antara BBRP2BKP dengan mitra terkait (Unit Kerja lingkup KKP, Perguruan Tinggi, Dinas Kab/Kota, pihak Swasta, serta pemangku kepentingan lainnya).
- e. Aspek strategis BBRPPBKP terhadap BPPSDM tercermin melalui berbagai dukungan yang telah dilaksanakan, antara lain mendukung program pendidikan vokasi kelautan dan perikanan melalui Program Pembelajaran Taruna Berprestasi (PTB), mendukung SFV Desa Ngablak, Kabupaten Boyolali melalui

kegiatan pelatihan pengolahan produk ikan secara *on line*, serta menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Secara spesifik, pelatihan ini diarahkan untuk memperkuat keterampilan teknis pengolahan, penerapan standar higiene dan keamanan pangan, diversifikasi produk, serta pengelolaan usaha secara sederhana dan efektif. Ke depan, berbagai kegiatan tersebut menjadi peluang kontribusi berkelanjutan dalam memperkuat peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi BBRP2BKP pada Tahun 2025 yaitu:

- a. Belum selesainya proses transformasi kelembagaan BBRP2BKP pasca terbitnya Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN sehingga BBRP2BKP tidak mempunyai program yang bersifat strategis dan hanya melaksanakan kegiatan dukungan manajemen internal saja;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Produksi Garam, walaupun Pejabat dan pegawai BBRP2BKP masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya pada BPPSDMKP sampai

dengan ditetapkannya jabatan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu aset, anggaran, dan dokumen dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen BPPSDMKP.

- c. BBRP2BKP hanya melaksanakan satu program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.100.000.000. Namun demikian anggaran ini kemudian berkurang menjadi sebesar Rp13.058.100.000 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun 2025. Anggaran ini hanya terbatas untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional kantor serta layanan dukungan manajemen kinerja internal. Dengan kondisi ini BBRP2BKP tidak bisa maksimal memberikan dukungan terhadap program yang menjadi prioritas BPPSDMKP maupun KKP.
- d. Jumlah SDM BBRP2BKP berkurang karena sebagian pegawai pindah/mutasi ke unit kerja lain, yaitu ke Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Kebijakan Strategis. Hal ini menyebabkan berkurangnya tenaga kerja, adanya kekosongan peran/tugas, adanya peningkatan beban kerja serta penyesuaian ulang tugas pegawai di BBRP2BKP.

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja ini bertujuan untuk menyajikan pencapaian kinerja BBRP2BKP Tahun 2025, yaitu dengan melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi capaian kinerja pada Tahun 2025 terhadap rencana kinerja Tahun 2025 serta membandingkan capaiannya dengan Tahun 2024. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan

Berisi gambaran umum tentang BBRP2BKP (tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai) dan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang di hadapi organisasi

2. Bab II – Perencanaan Kinerja

Berisi uraian singkat tentang Rencana Kegiatan, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.

3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi analisis capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (jika ada);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan/ peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

Berupa Perjanjian Kinerja, Surat Tugas Tim Teknis Tata Kelola Kinerja tahun berjalan, link bukti dukung capaian kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen pencapaian lainnya.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sebagai tindaklanjut terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 8 November 2024, maka ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, Unit Eselon IIa di BPPSDMKP terdiri 4 (empat) Pusat dan 1 (satu) Sekretariat Badan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPSDMKP mempunyai tugas menyelenggarakan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;

- d. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai salah satu UPT di bawah BPPSDMKP, pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran BBRP2BKP mengacu pada Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BPPSDMKP. KKP memiliki Visi, yaitu *"Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*. Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPSDMKP merumuskan visi spesifik, yaitu *"Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan"*.

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. "Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. "Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;

3. "Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas" yang melaksanakan Asta Cita 7

Dalam melaksanakan misi KKP ke-3 yaitu *"Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan"*, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu *"Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional"*. Untuk mewujudkan Misi BPPSDM Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu *"Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing"* dengan indikator meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

2.2. Sasaran Kegiatan

Peta strategis merupakan suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Kegiatan (SK) ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis BBRP2BKP. Peta strategis memudahkan BBRP2BKP untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman terhadap pencapaian visi BBRP2BKP.

Pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP, BPPSDMKP berperan mengawal Sasaran Strategis *"Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan"*. Peran ini diwujudkan melalui penguatan fungsi penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di seluruh unit kerja BPPSDMKP agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara terintegrasi dan berorientasi hasil. Untuk

mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator kinerja utama beserta target capaian yang akan menjadi acuan pelaksanaan dan pengendalian kinerja pada periode tahun 2025–2029.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDMKP, dengan sasaran yaitu *“Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, agile dan akuntabel dalam Penyuluhan dan BPPSDMKP”*, BBRP2BKP menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi Kedua pada tanggal 4 Desember 2025 yang terdiri atas 1 Sasaran Kegiatan (SK) yaitu *“Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”* yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK) berikut:

1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%) dengan target 85;
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai) dengan target 92;
3. Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai) dengan target 82;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai) dengan target 71,5;
5. Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks) dengan target 85;
6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%) dengan target 80;
7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%) dengan target 80;
8. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%) dengan target 100%.

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan BBRP2BKP, pada awal tahun 2025 BBRP2BKP mempunyai alokasi anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Adapun perkembangan anggaran sampai dengan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Revisi Anggaran BBRP2BKP Tahun 2025

Jenis Belanja	DIPA Awal (02 Desember 2024)	DIPA Revisi 1 (21 Januari 2025)	DIPA Revisi 2 (21 Februari 2025)	DIPA Revisi 3 (11 Maret 2025)
Belanja Pegawai	8.150.000.000	8.150.000.000	8.150.000.000	8.150.000.000
Belanja Barang	7.950.000.000	7.950.000.000	7.950.000.000	7.950.000.000
Pagu	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000

Jenis Belanja	DIPA Revisi 4 (09 April 2025)	DIPA Revisi 5 (24 April 2025)	DIPA Revisi 6 (15 Juli 2025)	DIPA Revisi 7 (24 Juli 2025)	DIPA Revisi 8 (1 September 2025)
Belanja Pegawai	8.150.000.000	8.150.000.000	6.964.704.000	6.964.704.000	6.964.704.000
Belanja Barang	7.950.000.000	7.950.000.000	7.800.000.000	7.800.000.000	5.773.396.000
Pagu	16.100.000.000	16.100.000.000	14.764.704.000	14.764.704.000	12.738.100.000

Jenis Belanja	DIPA Revisi 9 (15 Oktober 2025)	DIPA Revisi 10 (13 November 2025)	DIPA Revisi 11 (19 November 2025)	DIPA Revisi 12 (12 Desember 2025)
Belanja Pegawai	6.964.704.000	6.964.704.000	6.874.704.000	6.874.704.000
Belanja Barang	5.773.396.000	5.773.396.000	6.163.396.000	6.163.396.000
Pagu	12.738.100.000	12.738.100.000	13.038.100.000	13.038.100.000

Sumber: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-032.12.2.403835/2025

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA-031.12.2.403835/2025 (awal), BBRP2BKP memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp16.100.000.000, yang

terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp8.150.000.000 dan Belanja Barang sebesar Rp7.950.000.000.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Sekretaris BPPSDM Nomor B.100/BPPSDM.1/RC.410/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penggajian Pegawai Non-ASN di Lingkungan KKP, dilakukan revisi anggaran untuk mengakomodasi penganggaran gaji pegawai Non-ASN (PPNPN). Pada saat itu, PPNPN di BBRP2BKP berjumlah 15 orang yang sedang menunggu arahan lebih lanjut terkait penetapan Nomor Induk PPPK karena telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK Tahun 2024. Bersamaan dengan hal tersebut, dilakukan pula revisi anggaran POK pada Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Revisi ini ditetapkan melalui DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA-031.12.2.403835/2025 Revisi ke-01 tanggal 21 Januari 2025.

Berikutnya, menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindak Lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam pelaksanaan APBN TA 2025, Nota Dinas Sekretaris Jenderal KKP Nomor 256/SJ/RC.420/II/2025 tanggal 14 Februari 2025, serta hasil Rapat Pimpinan BPPSDM tanggal 17 Februari 2025, BBRP2BKP mendapatkan blokir efisiensi anggaran sebesar Rp4.920.438.000. Namun, karena telah terdapat realisasi dan *secure* anggaran *outstanding contract* pada aplikasi OMSPAN, blokir efisiensi yang dapat dilaksanakan hanya sebesar Rp4.001.586.000 dan telah terinput dalam aplikasi SAKTI. Revisi tersebut ditetapkan melalui DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA-031.12.2.403835/2025 Revisi ke-02 tanggal 21 Februari 2025. Pada kondisi ini, seluruh kegiatan operasional dan non operasional belum teralokasikan, termasuk terblokirnya pagu

honor PPNPN, PJLP serta langganan daya dan jasa seperti listrik, air, dan telepon.

Untuk memenuhi pembayaran honor PPNPN dan PJLP serta langganan daya dan jasa (listrik, air, dan telepon) pada bulan Maret dan April 2025, dilakukan revisi anggaran berupa pemutakhiran KPA pada Rincian Output 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Revisi tersebut ditetapkan melalui DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA-031.12.2.403835/2025 Revisi ke-03 tanggal 11 Maret 2025.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-327/AG/AG.3/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, telah disahkan penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA sebesar Rp54.299.861.000. Dari total tersebut, BBRP2BKP memperoleh pembukaan blokir anggaran untuk pembayaran honor PPNPN, PJLP beserta BPJS, serta langganan jasa air, internet, telepon, dan listrik sebesar Rp1.974.982.000. Revisi ini dituangkan dalam DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA-031.12.2.403835/2025 Revisi ke-04 tanggal 9 April 2025.

Dalam rangka meningkatkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran, dilakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada masing-masing output kegiatan yang berdampak pada perubahan data Halaman III DIPA. Revisi tersebut ditetapkan melalui DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA-031.12.2.403835/2025 Revisi ke-05 tanggal 24 April 2025.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-607/AG/AG.3/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2025 lingkup BPPSDMKP, telah disahkan usulan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan satker baru Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP sebesar Rp1.953.291.000 serta rekomposisi blokir anggaran *Smart Fisheries Village* (SFV) Maros sebesar Rp300.000.000. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BBRP2BKP mengalihkan pagu sebesar Rp1.335.296.000 sehingga pagu anggaran BBRP2BKP menjadi Rp14.764.704.000 sebagaimana tertuang dalam DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Revisi ke-06 tanggal 15 Juli 2025.

Dalam rangka peningkatan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran 2025, dilakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana serta pergeseran anggaran pada Layanan Perkantoran. Revisi ini ditetapkan melalui DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA-031.12.2.403835/2025 Revisi ke-07 tanggal 24 Juli 2025. Dengan demikian, pada akhir Juli 2025 pagu anggaran BBRP2BKP menjadi Rp14.764.704.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp6.964.704.000 dan Belanja Barang sebesar Rp7.800.000.000.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Sekretaris BPPSDM Nomor B.5139/BPPSDM.1/RC.410/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 terkait pemenuhan kebutuhan revitalisasi prasarana dan sarana pendidikan kelautan dan perikanan, dilakukan penghapusan blokir anggaran sebesar Rp2.026.604.000. Revisi tersebut ditetapkan melalui DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Revisi ke-08 tanggal 1 September 2025, sehingga pada akhir September 2025 pagu anggaran BBRP2BKP menjadi

Rp12.738.100.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp6.964.704.000 dan Belanja Barang sebesar Rp5.773.396.000.

Dalam rangka peningkatan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran 2025, kembali dilakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana yang mengubah data Halaman III DIPA sebagaimana ditetapkan melalui DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Revisi ke-09 tanggal 15 Oktober 2025.

Selanjutnya, dilakukan usulan pergeseran anggaran pada Layanan Perkantoran, khususnya pada akun Belanja Pegawai untuk pembayaran gaji PPPK baru serta Belanja Barang guna mengoptimalkan kebutuhan operasional BBRP2BKP. Revisi ini masih menunggu surat izin pembukaan blokir dari Kementerian Keuangan karena bersamaan dengan pembukaan blokir anggaran RM untuk kegiatan prioritas di lingkungan KKP. Oleh karena itu, DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Revisi ke-10 diperkirakan terbit pada 13 November 2025.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-986/AG/AG.3/2025 tanggal 19 November 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2025 lingkup BPPSDMKP, telah disahkan revisi anggaran berupa perubahan pagu, pergeseran anggaran non operasional ke operasional, serta perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. Dari hasil revisi tersebut, BBRP2BKP memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp300.000.000 untuk operasional perkantoran, sehingga pagu anggaran menjadi Rp13.038.100.000 sebagaimana tertuang dalam DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Revisi ke-11 tanggal 19 November 2025. Menindaklanjuti penambahan tersebut, BBRP2BKP menyatakan kesanggupan penyerapan anggaran Tahun 2025 melalui surat

pernyataan pada lampiran Nota Dinas Nomor 116/BBRPPBKP/RC.610/XI/2025.

Revisi ke-12 terhadap DIPA Petikan Nomor SP DIPA-032.12.2.403835/2025 dengan kode DS: 8526-7911-5408-7578 terbit pada tanggal 12 Desember 2025. Revisi ini dilakukan karena ada pergeseran anggaran untuk memenuhi alokasi kebutuhan pembayaran tunjangan pegawai PPPK serta lembur pegawai.

Sampai dengan bulan Desember 2025, alokasi anggaran BBRP2BKP sebesar Rp13.038.100.000 yang digunakan untuk melaksanakan satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, telah disusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang ditandatangani pada 24 Januari 2025 antara Plt. Kepala BBRP2BKP dengan Kepala BPPSDMKP. Perjanjian Kinerja tersebut terdiri atas 1 Sasaran Kegiatan (SK) dan 8 Indikator Kinerja (IK).

Kemudian, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP-DIPA-032.12.2.403835/2025 Revisi Ke 06 pada tanggal 15 Juli 2025, terdapat pengurangan pagu untuk Program Dukungan Manajemen (kode 032.12.WA) yang semula Rp16.100.000.000,- menjadi Rp14.764.704.000,-. Hal ini menyebabkan terbitnya Perjanjian Kinerja BBRP2BKP versi revisi tanggal 11 Agustus 2025.

Perjanjian Kinerja Revisi tersebut hanya mengubah data anggaran, namun tidak mengubah target dalam setiap Indikator Kinerja Kegiatan. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja kembali direvisi pada 4 Desember 2025 sehubungan dengan adanya perubahan jumlah alokasi anggaran yang dikelola BBRP2BKP serta perubahan penandatanganan pihak pertama akibat pergantian Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BBRP2BKP, sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Kepala BPPSDM KP Nomor B.2138/BPPSDM/KP.440/IX/2025 tanggal 23 September 2025.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK (24 Januari 2024)	Target PK Revisi I (11 Agustus 2025)	Target PK Revisi II (4 Desember 2025)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)	85	85	85
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	92	92	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)	82	82	82
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	71,5	71,5	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	85	85	85
		6	Persentase rencana umum pengadaan	80	80	80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK (24 Januari 2024)	Target PK Revisi I (11 Agustus 2025)	Target PK Revisi II (4 Desember 2025)
			PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)			
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)	80	80	80
		8	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	100	100	100

Sumber: Perjanjian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025

2.5 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

a. Rumusan Pengukuran

Pengukuran Capaian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja (IK), sehingga akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Jenis Indikator pada aplikasi KinerjaJaku dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dimana jika Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dikelompokkan dari alokasi anggarannya, yaitu memakai alokasi anggaran Layanan Dukungan Manajerial. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator Kinerja.

b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BBRP2BKP dilakukan secara berkala setiap triwulan, yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran adalah Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Surat Tugas Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Nomor: B.21/BBRPPBKP/KP.440/I/2025 tanggal 3 Januari 2025.

Tim ini bertugas dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja BBRP2BKP Tahun 2025 yang meliputi kegiatan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Keanggotaan Tim terdiri dari Penanggung Jawab yang bertanggung jawab atas tata kelola kinerja BBRP2BKP Tahun 2025; Ketua yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan atas tata kelola kinerja BBRP2BKP Tahun 2025; dan Anggota yang menyiapkan bahan-bahan dan membantu Ketua dalam penyusunan atas tata kelola kinerja BBRP2BKP Tahun 2025.

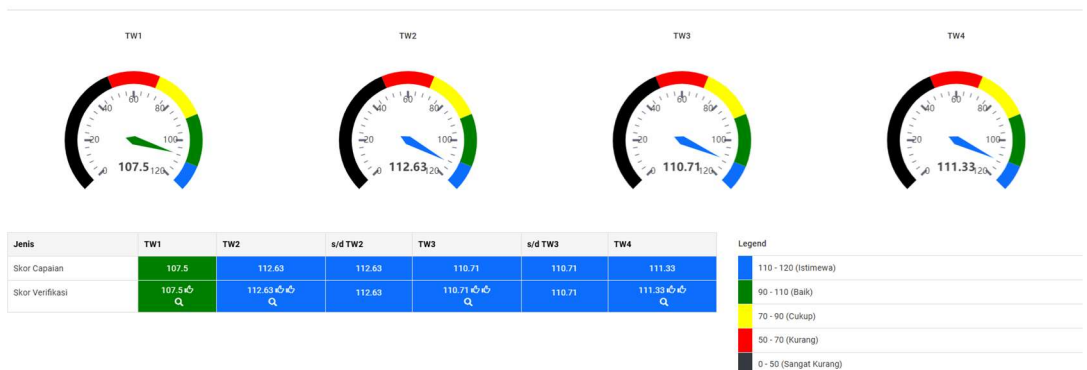
III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini BBRP2BKP telah membentuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 untuk melaksanakan kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh Sasaran Kegiatan (SK) yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang dikelola oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian Kinerja Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan BBRP2BKP dari bulan Januari hingga Desember yang terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan (SK) dan 8 Indikator Kinerja (IK). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi dari masing-masing IK yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi *Kinerjaku*, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBRP2BKP pada akhir Tahun 2025 mendapatkan Skor Kinerja sebesar **111,33** dengan status **ISTIMEWA**, sebagaimana Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Dashboard Kinerjaku BBRP2BKP Tahun 2025

BBRP2BKP memiliki 8 Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan diukur capaiannya pada tahun 2025 yaitu IK-1: Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%); IK-2: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai); IK-3: Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai); IK-4: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai); IK-5: Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks); IK-6: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%); IK-7: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%); dan IK-8: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%).

Dari 8 Indikator Kinerja yang diukur terdapat 4 Indikator Kinerja yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan dengan kategori/status **"Istimewa"**, serta 4 Indikator Kinerja dengan capaiannya sesuai target yang ditetapkan dengan kategori/status **"Baik"**.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan/ sasaran BBRP2BKP. Capaian IK BBRP2BKP pada Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target/Capaian			Keterangan
				Target 2025	Capaian Tahun 2025	%	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)	85	85	100	
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	92	98,57	107,14	
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)	82	84	102,44	
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	71,50	100	120	
		5	Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	85	88,49	104,11	

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target/Capaian			Keterangan
				Target 2025	Capaian Tahun 2025	%	
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)	80	100	120	
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)	80	97,50	120	
		8	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	100	121,43	120	

Warna	Keterangan
	Istimewa (nilai 110 - 120)
	Baik (nilai 90 - <110)
	Cukup (nilai 70 - < 90)
	Kurang (nilai 50 - < 70)
	Sangat Kurang (nilai <50)
	Belum ada penilaian

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id/>

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui capaian kinerja Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) IK yang memiliki capaian dengan nilai ≥ 110 -120% (notifikasi berwarna biru) dan 4 (empat) IK yang memiliki capaian dengan nilai 90 - <110 (notifikasi berwarna hijau).

Evaluasi dan analisis kinerja pada Laporan Kinerja Triwulan menampilkan 5 (lima) poin analisis sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Berikut analisis capaian kinerja pada setiap Indikator Kinerja:

Sasaran Kegiatan 1

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 1 pada aplikasi Kinerjaku, seluruh Indikator Kinerja memiliki kode IKM (Indikator Kinerja Manajerial), karena anggarannya berasal dari Program Dukungan Manajemen.

BBRP2BKP memiliki 1 Sasaran Kegiatan (SK) dan 8 IK. Pada Tahun 2025 Skor Kinerja sebesar **111,33** diperoleh dari pengukuran capaian kinerja 8 IK, yaitu IK-1: Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%); IK-2: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai); IK-3: Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai); IK-4: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai); IK-5: Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks); IK-6: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%); IK-7: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%); dan IK-8: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%).

Indikator Kinerja 1

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)

Indikator Kinerja ini memiliki definisi jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Tahun 2024 s.d. Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon II lingkup BPPSDMKP. Bagi Satker yang tidak diuji petik Pengawasan oleh Itjen, maka nilai capaian Satker yang diperoleh maksimal sebesar 85 (sesuai target) dengan persentase capaian

sebesar 100%. Capaian kinerja IK 1 pada Tahun 2025 diukur menggunakan periode pengukuran triwulan. Capaian IK 1 disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IK 1

IK 1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)									
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025				Rencana Kegiatan BBRPPBKP Tahun 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	%Capaian thd Target 2029
100	100	100	82	85	85	100	15	85	100,00

Capaian kinerja IK 1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRP2BKP pada Tahun 2025 tercatat sebesar 85%, sesuai dengan target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 85%. Dengan realisasi tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah terpenuhi secara optimal. Data dukung pencapaian indikator ini antara lain Surat Sekretaris BPPSDM Nomor B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal capaian IKU terkait batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan KKP serta pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, realisasi kinerja mengalami kenaikan secara nilai absolut, dari 82% pada tahun 2024 menjadi 85% pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 3 poin. Namun demikian, dari sisi persentase capaian terhadap target, terjadi penurunan, dari sekitar 120% pada Tahun 2024 menjadi 100% pada Tahun 2025. Penurunan persentase capaian ini disebabkan oleh

perbedaan mekanisme penilaian, bukan oleh penurunan kinerja substantif. Pada tahun 2024, capaian melebihi target karena adanya uji petik pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dan seluruh temuan dapat ditindaklanjuti secara tuntas, sehingga memungkinkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, tidak dilaksanakannya kegiatan uji petik oleh Inspektorat Jenderal menyebabkan satuan kerja yang tidak menjadi objek pengawasan memperoleh nilai maksimal sebesar target, yaitu 85% dengan persentase capaian 100%, sesuai arahan dari Biro Perencanaan. Dengan demikian, meskipun persentase capaian tidak melampaui target seperti tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 tetap mencerminkan kinerja yang baik dan konsisten dalam pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja organisasi.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 85%, capaian IK 1 pada Tahun 2025 telah sepenuhnya mencapai target jangka menengah tersebut, dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan pada BBRP2BKP telah berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran strategis jangka menengah, serta mencerminkan komitmen organisasi dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan satuan kerja lingkup BPPSDMKP yang memiliki indikator kinerja sejenis, yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), terlihat bahwa kedua satuan kerja memiliki target yang sama sebesar 85 dan capaian yang sama sebesar 100%. Kondisi ini terjadi karena keduanya tidak menjadi objek uji petik oleh Inspektorat Jenderal, sehingga nilai capaian maksimal yang dapat diperoleh sesuai ketentuan adalah sebesar 85 dengan persentase capaian 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja ini antara lain adalah terlaksananya koordinasi yang baik serta adanya komitmen kuat dari penanggung jawab indikator kinerja dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal hingga terbitnya dokumen Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan, apabila terdapat temuan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen (Dukman) di BBRP2BKP juga telah berjalan dengan pemantauan dan koordinasi yang baik, sehingga mendukung kelancaran proses pengawasan dan pencapaian target kinerja secara optimal.



Gambar 4. Rapat internal tim keuangan dan umum

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain pelaksanaan monitoring melalui aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi (SIDAK) pada laman <https://sidak.kkp.go.id/>. Selain itu, dukungan kegiatan berbasis anggaran diwujudkan melalui penyusunan Laporan UAKPA BBRPPBKP TA 2024, Laporan Keuangan UAKPA Semester I Tahun 2025, dan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025, penyusunan laporan SPIP, serta pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dengan KPPN Jakarta VI.

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan “Layanan Umum: Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara” dengan pagu anggaran sebesar Rp4.544.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp4.543.700,- (99,99%).

Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)

Indikator Kinerja ini didefinisikan sebagai Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Capaian kinerja IK 2 pada Tahun 2025 menggunakan periode pengukuran semester.

Capaian kinerja IK 2 pada tahun 2025 sebesar 98,57 dengan persentase capaian sebesar 107,14%, sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026. Capaian kinerja IK 2 selanjutnya disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian IK 2

IK 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)									
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025				Rencana Kegiatan BBRPPBKP Tahun 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	%Capaian thd Target 2029
91,12	93,59	95,94	92,39	92	98,57	107,14	6,18	92	107,14

Bukti dukung capaian IK ini, selain Nota Dinas dari Biro Keuangan terkait capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup KKP, juga didukung oleh tangkapan layar (screenshot)

dari aplikasi OM SPAN. Berdasarkan realisasi Triwulan IV Tahun 2021–2024, nilai IK 2 Pelaksanaan Anggaran BBRPPBKP menunjukkan tren fluktuatif namun relatif stabil, yaitu 91,12 (2021), meningkat menjadi 93,59 (2022) dan 95,94 (2023), kemudian menurun menjadi 92,39 (2024). Pada tahun 2025, dengan target 92, realisasi mencapai 98,57 atau 107,14% dari target, sehingga melampaui target tahun sekaligus melampaui target jangka menengah tahun 2029 sebesar 92 (107,14% terhadap target 2029). Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya serta mencerminkan pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan optimal.

MONEVPA

BALAI BESAR RI...
T.A. 2025

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN II DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	94.39	100.00	100.00	100.00	94.07	100.00	98.57	100%	0.00	98.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.16	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek		97.20			98.52		100.00				

Gambar 5. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP Tahun 2025

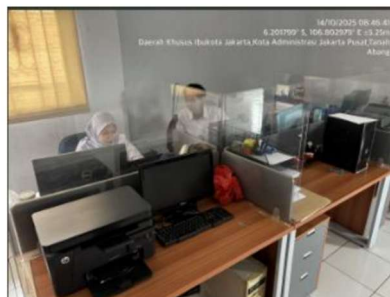
Apabila dibandingkan dengan satuan kerja di lingkup BPPSDMKP yang memiliki indikator kinerja sejenis, yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) dengan target yang sama sebesar 92, capaian kinerja Tahun 2025 BBRPPBKP sebesar 98,57 dan capaian kinerja BBRSEKP sebesar 99,35, yang menunjukkan bahwa kedua satker telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun capaian BBRPPBKP masih sedikit berada di bawah capaian satker pembanding.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK ini yaitu telah melakukan penyesuaian kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja anggaran, serta adanya komitmen pimpinan untuk mengawal tercapainya nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan tersebut meliputi:



Gambar 6. Rapat Revisi Anggaran BBRP2BKP TA 2025

- Mengikuti rapat Sosialisasi Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 *via zoom meeting* pada Kamis-Jumat, 9-10 Oktober 2025.
- Melakukan Proses Revisi Halaman III DIPA TA. 2025 di ruang Tata Operasional pada Selasa, 14 Oktober 2025.



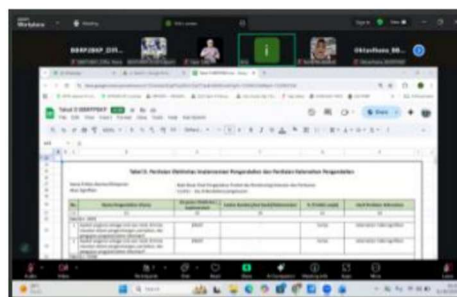
Gambar 7. Revisi Halaman III DIPA TA 2025

- Mengikuti Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Periode Triwulan III TA 2025 pada Senin-Jumat, 13-17 Oktober 2025.
- Koordinasi dan penginputan pada aplikasi SAKTI terkait pergeseran anggaran belanja pegawai BBRPPBKP tahun 2025 di ruang Tata Operasional pada Rabu, 29 Oktober 2025.



Gambar 8. Penginputan pada aplikasi SAKTI

- Mengikuti Rapat Koordinasi Tim Keuangan terkait Laporan Hasil Penilaian PIPK UAKPA Tahun 2025, *via zoom meeting* pada Jumat, 31 Oktober 2025.



Gambar 9. Koordinasi Tim Keuangan terkait Laporan Hasil Penilaian PIPK UAKPA

- Melakukan Pemutakhiran KPA untuk revisi DIPA terkait akun belanja pegawai BBRPPBKP pada aplikasi SAKTI di ruang Tata Operasional pada Jumat, 12 Desember 2025.



Gambar 10. Pemutakhiran KPA untuk revisi DIPA

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini antara lain pelaksanaan koordinasi intensif antara pimpinan, Kepala Subbagian Umum, dan para penanggung jawab kegiatan. Selain itu, dilakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta realisasi anggaran secara berkala, penerapan sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta penginputan capaian output setiap awal bulan melalui aplikasi SAKTI. Adapun program yang mendukung optimalisasi capaian anggaran meliputi pengisian dan pemutakhiran data capaian output pada aplikasi e-Monev Bappenas serta pada aplikasi SAKTI secara konsisten dan tepat waktu.

Anggaran IK ini terdapat pada rincian output/komponen "Layanan Umum: Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan" dengan pagu anggaran sebesar Rp2.373.000,- serta realisasi sebesar Rp2.373.000,- (100%).

Indikator Kinerja 3

Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP. Nilai PM SAKIP BBRP2BKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Satker BBRP2BKP dengan Unit Eselon I BPPSDMKP. Evaluasi atas SAKIP sesuai dengan LKE pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 8. Capaian IK 3

IK 3. Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)									
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025				Rencana Kegiatan BBRPPBKP Tahun 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	%Capaian thd Target 2029
-	-	81,6	82,75	82	84	102,44	1,25	82	102,44

Data dukung capaian ini mengacu pada Surat Sekretariat BPPSDM Nomor: B.4485/BPPSDM.1/RC.510/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 2 lingkup BPPSDM. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 82, capaian Tahun 2025 meningkat menjadi 84, atau mengalami kenaikan sebesar 1,25 poin, sehingga mendapatkan persen capaian sebesar 102,44. Data capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 8. Secara substansi,

realisasi kinerja tahun 2025 tetap menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan telah melampaui target jangka menengah, sehingga menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja BBRP2BKP pada masa mendatang.

Secara keseluruhan, kinerja IK 3 pada tahun 2025 berada pada kategori sangat baik, ditandai dengan keberhasilan melampaui target tahun 2025, serta capaian kinerja yang telah melebihi target jangka menengah tahun 2029. Ke depan, BBRP2BKP perlu terus menjaga konsistensi implementasi SAKIP serta meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan Satker lingkup BPPSDMKP yang memiliki IK sejenis, yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), dengan target yang sama sebesar 71,5, capaian kinerja BBRSEKP juga menunjukkan nilai yang sama, yaitu 84, sehingga mencerminkan kesetaraan capaian kinerja antar satuan kerja dengan karakteristik indikator yang sejenis.

Adapun kegiatan yang mendukung capaian IK ini yaitu telah dilaksanakan *Kick Off Meeting* Implementasi SAKIP, Penilaian Mandiri BBRP2BKP Tahun 2025 serta verifikasi bukti dukung SAKIP BBRP2BKP selama bulan Mei-Juni Tahun 2025, yang mencakup:

1. Pemenuhan dokumen SAKIP meliputi dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. Pengisian hasil penilaian mandiri SAKIP pada aplikasi DSMS BPPSDMKP.



Gambar 11. Kick Off Meeting dan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPSDMKP Tahun 2025

Verifikasi ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021. Setelah melaksanakan verifikasi tersebut, BBRP2BKP mendapatkan nilai atas penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPSDMKP sebesar 84,00 dengan predikat A (Memuaskan). Nilai tersebut melebihi target tahun 2025 yang ditetapkan (82).

Faktor pendukung progress capaian IK ini yaitu tersedianya dokumen perencanaan BBRP2BKP tahun 2025, dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja, serta Sasaran Kinerja Pegawai yang tersaji pada aplikasi e-SKP.

Program/kegiatan yang menunjang progress capaian IK ini diantaranya:

- Melakukan perbandingan realisasi kinerja (*benchmark* kinerja) antar unit kerja yang selevel di internal BPPSDMKP.
- Mendokumentasikan kegiatan (undangan, notulensi, laporan, foto, dll) terkait pembahasan perencanaan, pengukuran,

pelaporan dan evaluasi kinerja yang melibatkan pimpinan. Kegiatan tersebut antara lain:

- Rapat koordinasi internal dan Penyampaian sasaran dan indikator kinerja KKP, BPPSDMKP dan indikator kinerja BBRP2BKP 2025, oleh Plt. Kepala BBRP2BKP kepada pegawai, di ruang rapat Naratama; Senin, 6 Januari 2025.



Gambar 12. Penyampaian sasaran dan indikator kinerja KKP, BPPSDMKP dan indikator kinerja BBRP2BKP 2025

- Menghadiri undangan untuk Cascading IKU dan Penyusunan Rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Ruang Rapat Sekretariat BPPSDM Lantai 7, Gedung Mina Bahari III, Gambir, Jakarta Pusat; Jumat, 10 Januari 2025.



Gambar 13. Cascading IKU dan Penyusunan Rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

- Rapat verifikasi dan validasi capaian kinerja level II lingkup BPPSDM dan pengukuran capaian kinerja level 1 BPPSDM,

data dukung TW IV BBRP2BKP di RR. Sekretariat BPPSDM Lt.7 GMB 3; Jumat, 3 Januari 2025.



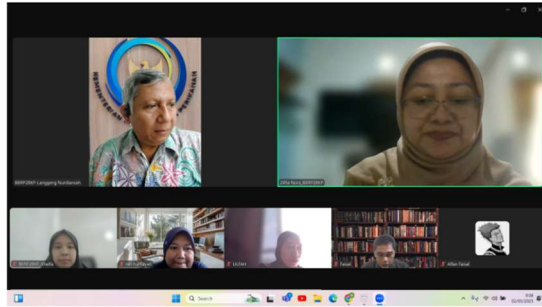
Gambar 14. Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Lingkup BPPSDMKP

- Rapat sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pendataan pegawai BBRP2BKP yang akan mengisi formasi pegawai pada Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Aula Sumpeno Putro BBRP2BKP pada Kamis, 13 Februari 2025



Gambar 15. Rapat Sosialisasi PerMenKP No 2 Tahun 2025

- Menghadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan SAKIP BBRP2BKP Tahun 2025, *via zoom meeting* pada Jumat, 2 Mei 2025.



Gambar 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan SAKIP

- Seluruh pegawai BBRP2BKP mengikuti Pelatihan SAKIP Tahun 2025 melalui e-milea KKP.



Gambar 17. Pelatihan SAKIP Tahun 2025

- Rapat verifikasi dan validasi capaian kinerja level 2 lingkup BPPSDM dan pengukuran capaian kinerja level 1 BPPSDM, data dukung TW III Tahun 2025 BBRP2BKP di Politeknik AUP; Rabu, 8 Oktober 2025.



Gambar 18. Rapat Verifikasi Data Dukung TW III Tahun 2025

- Rapat dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMKP Tahun 2025-2029 di ruang rapat lantai 6, GMB III; Senin, 10 November 2025.



Gambar 19. Rapat penyusunan rancangan Renstra BPPSDMKP.

- Rapat lanjutan pembahasan Finalisasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra BPPSDM KP Tahun 2025-2029) di Ruang Rapat Lantai 3, Pusat Penyuluhan KP; Kamis, 13 November 2025.



Gambar 20. Rapat lanjutan finalisasi penyusunan Rentsra BPPSDMKP

- Pada Kegiatan Rapat Pimpinan Koordinasi Perencanaan lingkup BPPSDM Tahun 2026 yang dilaksanakan 19 September 2025 di Serpong, Tangerang, BBRP2BKP berhasil meraih Peringkat Terbaik ke-2 Evaluasi AKIP Level II di lingkup BPPSDMKP



Gambar 21. BBRP2BKP berhasil meraih Peringkat ke-2 Evaluasi AKIP Level II

- Memastikan adanya informasi terkait efisiensi sumberdaya pada Laporan Kinerja (LKj), menyampaikan bukti data dukung tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan pada LKj dan evaluasi rencana aksi; serta menyajikan dokumen perencanaan dan LKj dalam website <https://kkp.go.id/>.

Dari faktor yang mendukung anggaran, upaya yang dilakukan meliputi keikutsertaan dalam pelatihan dan penilaian mandiri SAKIP lingkup KKP, penyiapan serta unggah data dukung pada GDrive dan DSMS BPPSDMKP, serta penyusunan laporan kinerja dan laporan rutin mingguan, bulanan, dan tahun BBRPPBKP secara konsisten dan tepat waktu.

Anggaran untuk indikator kinerja ini dialokasikan pada output/komponen “Layanan Pemantauan dan Evaluasi: Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp0 dan realisasi sebesar Rp0, sehingga tingkat realisasi anggaran tercatat sebesar 100 persen.

Indikator Kinerja 4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga terhadap perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kementerian Keuangan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi, yang dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator.

Adapun capaian kinerja IK 4 menggunakan periode pengukuran tahun, dengan bukti dukung berupa Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Berdasarkan data realisasi tahun 2021–2024, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP baru tercatat pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 100 yang menjadi baseline penilaian kinerja.

Pada tahun 2025, BBRP2BKP menetapkan target tahun sebesar 71,5, dengan realisasi kinerja hingga akhir Tahun 2025 mencapai 100, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 120%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, kinerja tahun 2025 menunjukkan nilai yang tetap stabil dengan persentase kenaikan sebesar 0%, namun secara capaian terhadap target tetap berada pada kategori sangat baik karena target tahun 2025 ditetapkan lebih rendah. Data capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian IK 4

IK 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)									
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025				Rencana Kegiatan BBRPPBKP Tahun 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	%Capaian thd Target 2029
-	-	-	100	71,5	100	120	0	71,5	139,86

Selain itu, realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 71,5, dengan persentase capaian mencapai 139,86%, sehingga mencerminkan efektivitas perencanaan anggaran yang semakin baik dan memberikan landasan yang kuat bagi penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran BBRP2BKP secara berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan satuan kerja di lingkup BPPSDMKP yang memiliki indikator kinerja sejenis, yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), dengan target yang sama sebesar 71,5, kedua satuan kerja menunjukkan capaian kinerja yang sama, yaitu 100.

Adapun progres capaian IK ini yaitu telah mendapatkan nilai maksimal (100) pada aspek efektifitas serta efisiensi yang didapatkan dari pengisian capaian rincian output, penggunaan SBK dan efisiensi SBK.

Bukti capaian IKU ini berupa Nota Dinas dari Biro Keuangan dan BMN perihal capaian IK NKPA lingkup KKP dan/atau screenshot aplikasi Monev Kemenkeu.

The screenshot shows a web application interface for monitoring the progress of the NK Perencanaan Satuan Kerja. The interface includes a header with the title 'NK Perencanaan Satuan Kerja' and a 'Monitoring / NK Perencanaan Satuan Kerja' breadcrumb. Below the header, there is a search bar and a 'Download Excel' button. The main content area displays a table with the following columns: 'No.', 'Kode Satuan Kerja', 'Satuan Kerja', 'NK Perencanaan Anggaran', 'Efektivitas', and 'Efisiensi'. The table contains one row of data with the following values: '1', '001.11.40000', 'SATUAN KERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN BUDIDIPERAWA KELAUTAN DAN PERIKANAN', '100,00', '100,00', and '100,00'. The table is paginated, showing 'Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri' and navigation buttons for 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya'.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi
1	001.11.40000	SATUAN KERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN BUDIDIPERAWA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00

Gambar 22. Progress Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP

Faktor pendukung progress capaian IK ini yaitu:

- Komitmen pimpinan untuk mengawal tercapainya target IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP.
- Kemudahan monitoring informasi terkait komponen Nilai yang terangkum dalam aplikasi Monev Kemenkeu <https://monev.kemenkeu.go.id/>, yang terkoneksi dengan aplikasi SAKTI <https://sakti.kemenkeu.go.id/>.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian IK ini diantaranya melakukan penyerapan anggaran yang konsisten dengan DIPA, dan melakukan penginputan capaian output di setiap awal bulan pada aplikasi SAKTI yang akan otomatis terinput ke dalam aplikasi Monev Kemenkeu. Selain itu, faktor yang menunjang dari

aspek anggaran diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif, meliputi Perjanjian Kinerja, Manual IK, Rencana Aksi, dan rincian target, serta penyusunan laporan capaian output dan pelaksanaan revisi anggaran tahun 2025 secara tertib dan akuntabel.

Anggaran IK ini terdapat pada output/komponen “Layanan Pemantauan dan Evaluasi: Pelayanan Pelaporan Kinerja Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp0 serta realisasi sebesar Rp0 (100%).

Indikator Kinerja 5

Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO Sekretariat Jenderal, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Sumber data Nilai IP ASN Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi ropeg KKP pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/eselon>, serta didukung oleh Nota Dinas Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP Nomor

62/BPPSDM.1/KP.720/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran IP ASN Tahun 2025 Lingkup BPPSDM. Adapun capaian kinerja IK 5 pada indikator ini menggunakan periode pengukuran semester.

Tabel 10. Capaian IK 5

IK 5. Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan BBRPPBKP Tahun 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	%Capaian thd Target 2029
74,41	76,89	91,5	91,74	85	88,49	104,11	-3,25	85	104,11

Berdasarkan Tabel 10, pada tahun 2025, Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP menetapkan target tahun sebesar 85, dengan realisasi kinerja mencapai 88,49, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 104,11%. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan penyesuaian nilai, namun tetap melampaui target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan konsistensi peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan BBRP2BKP.

Selain itu, realisasi kinerja tahun 2025 juga telah melampaui target jangka menengah tahun 2029 sebesar 85, dengan persentase capaian mencapai 104,11%, sehingga secara keseluruhan kinerja IK 5 berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan konsistensi BBRP2BKP dalam menjaga serta meningkatkan profesionalitas ASN secara berkelanjutan.

Bukti dari capaian IK ini adalah Surat dari Sekretariat BPPSDMKP perihal capaian IK IP ASN lingkup BPPSDMKP dan/atau screenshoot aplikasi Simpeg Capture dari <http://www.ropeg.kkp.go.id/> --> IP ASN.



The screenshot shows the 'IP ASN 2025' dashboard. At the top, there is a navigation bar with links: Dashboard, Eselon, Pegawai, FAQ, and IP ASN 2024. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'Silakan ketik Nama Unit Kerja' and a 'Cari' button. The main content area displays a table with the following data:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	26	22.5	90%	34.62	86.13%	26.54	88.47%	5	100%	88.49	TINGGI

Below the table, there are navigation buttons: '<', '>', and '>>'.

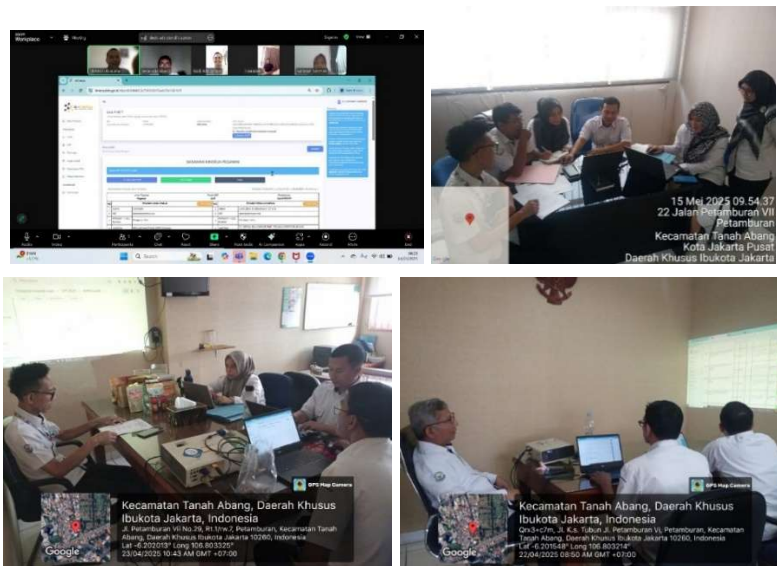
Gambar 23. Nilai Capaian IP ASN BBRPPBKP

Apabila dibandingkan dengan Satker lingkup BPPSDMKP yang memiliki IK sejenis, yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), dengan target yang sama sebesar 85, capaian kinerja BBRSEKP mencapai 93,8, sementara capaian kinerja BBRP2BKP sebesar 88,49. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua satuan kerja sama-sama melampaui target yang ditetapkan, capaian kinerja BBRSEKP relatif lebih tinggi dibandingkan BBRP2BKP.

Faktor pendukung progress capaian IK ini disebabkan oleh tersedianya pelatihan dan seminar secara online, kemudahan mengakses website IP ASN website <https://asndigital.bkn.go.id/> untuk inputan data dukung.

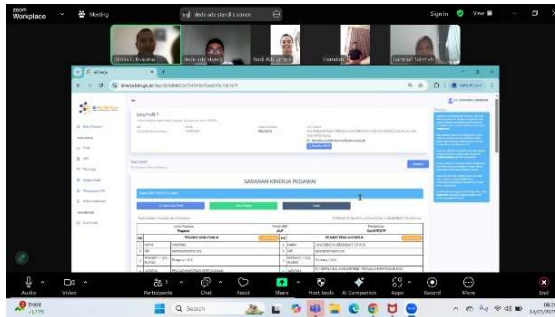
Program/kegiatan yang menunjang progress pencapaian IK ini diantaranya:

- Plt. Kepala BBRP2BKP mendorong agar semua pegawai dapat meningkatkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan seperti keikutsertaan dalam webinar, pelatihan, workshop, tugas belajar, dan lainnya serta dibuktikan dengan data dukung berupa sertifikat yang diinput ke website <https://asndigital.bkn.go.id/>
- Melakukan koordinasi, verifikasi dan validasi terkait data dukung capaian yang diinput ke masing-masing SKP pegawai.



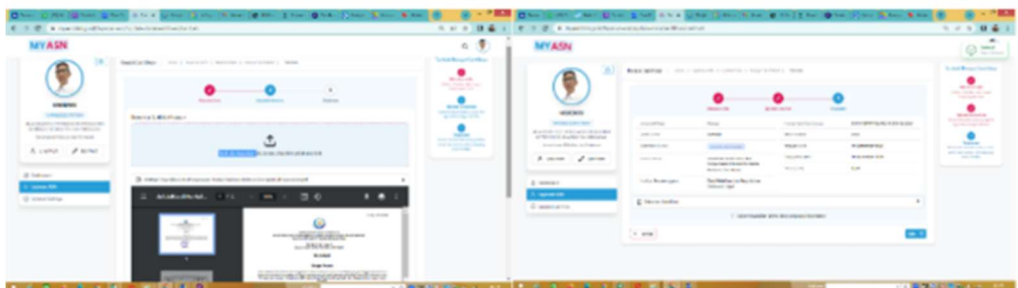
Gambar 24. Rapat koordinasi terkait kepegawaian

- Pegawai BBRP2BKP yang telah melaksanakan dan melaporkan keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, terutama dalam diklat 20 JP dan seminar/webinar.
- Peran aktif operator e-pegawai tetap diperlukan di dalam membantu mengupload bukti keikutsertaan tersebut, disamping pegawai yang bersangkutan juga dapat melakukannya secara mandiri melalui e-pegawai nya masing-masing.
- Melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian IP ASN masing-masing pegawai.
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka monitoring pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Periode I Tahun 2025 sebagai upaya memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen kinerja.



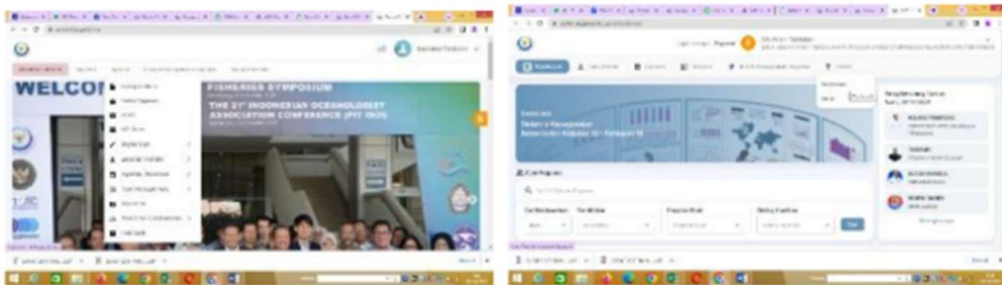
Gambar 25. Koordinasi terkait monitoring pengisian sasaran kinerja pegawai (SKP) periode I 2025

- Melaksanakan kegiatan penginputan data pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai ke dalam aplikasi MyASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 25 November 2025, sebagai bagian dari upaya pemutakhiran dan penataan data kepegawaian secara sistematis dan berkelanjutan.



Gambar 26. Penginputan diklat pegawai pada aplikasi MyASN.

- Melaksanakan kegiatan monitoring data Indeks Profesionalitas (IP) ASN pada tingkat organisasi yang dilaksanakan pada hari Senin, 20 Oktober 2025, guna memastikan akurasi, kelengkapan, dan keterkinian data kepegawaian.



Gambar 27. Monitoring data IP ASN.

Untuk IK 5, salah satu faktor pendukung berbasis anggaran dilakukan melalui pengecekan nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN BBRPPBKP secara berkala, pengumpulan dan pemantauan SKP pegawai, penyusunan daftar kualifikasi pegawai, serta rekapitulasi disiplin pegawai BBRP2BKP. Langkah-langkah tersebut menjadi dasar dalam memastikan pengelolaan SDM yang terukur, akuntabel, dan selaras dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Anggaran IK ini terdapat pada output/komponen “Layanan Manajemen SDM: 1) Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; 2) Pelayanan Jabatan Fungsional Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp0,- serta realisasi sebesar Rp0,- (100%).

Indikator Kinerja 6

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui

RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Capaian kinerja IK 6 pada Tahun 2025 diukur menggunakan periode pengukuran triwulan. Capaian IK 6 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian IK 6

IK 6 . Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan BBRPPBKP Tahun 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	%Capaian thd Target 2029
-	-	-	-	80	100	120	-	80	125

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja IK 6 Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP ditetapkan dengan target tahun sebesar 80. Hingga akhir Tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 100, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120%, sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor B.41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal

Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rencana umum pengadaan telah diumumkan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan melalui aplikasi SIRUP. Mengingat pada tahun 2021–2024 indikator ini belum menjadi objek pengukuran, capaian tahun 2025 menjadi baseline awal dalam penilaian kinerja IK 6. Selain itu, realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 80, dengan persentase capaian mencapai 125%, sehingga secara keseluruhan kinerja IK 6 berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan komitmen BBRP2BKP dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan satker Lingkup BPPSDMKP yang memiliki IK sejenis yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan target yang sama (80), dan memiliki capaian yang sama (100) dengan persentase capaian 120%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK ini yaitu adanya komitmen yang tinggi dari Plt. Kepala BBRP2BKP dan penanggung jawab IK untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak terkait (PPK, Sekretariat BPPSDMKP).

Faktor pendukung berbasis anggaran yang berperan dalam pencapaian IK ini antara lain memastikan penginputan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP dilakukan secara tepat dan akurat, serta melakukan pembaruan RUP apabila terdapat revisi anggaran. Selain itu, terdapat program dan kegiatan lain yang turut

menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, yaitu :

- Melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- Melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun.
- Koordinasi dan verifikasi data kebutuhan pengadaan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Subbagian Keuangan dan Umum untuk memastikan seluruh kegiatan telah tercantum dalam RUP.
- Penginputan dan pengumuman RUP melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- Pemantauan secara berkala terhadap progres pengumuman RUP di SIRUP, guna memastikan seluruh paket pengadaan telah terpublikasi dan sesuai dengan rencana kerja serta pagu anggaran yang tersedia.



Gambar 28. Perhitungan efisiensi anggaran pasca terbitnya peraturan Menteri Kemenkeu RI perihal Efisiensi Belanja Kementerian TA. 2025

Anggaran IK ini terdapat pada output/komponen “Layanan Perkantoran: Operasional dan Pemeliharaan Kantor” dengan pagu anggaran sebesar Rp6.156.479,000,- serta realisasi sebesar Rp6.154.971.372,- (99,98%).

Indikator Kinerja 7

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)

IK ini didefinisikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan IV tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 (bobot 25%);

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semester dan Tahun) secara tepat waktu (bobot 12,5%);
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (bobot 5%).

Capaian kinerja IK 7 pada Tahun 2025 diukur dengan periode pengukuran tahun. Data dukung capaian IK 7 berupa Nota Dinas Sekretaris BPPSDM Nomor 4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025”, serta Surat Sekretaris BPPSDMKP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP. IK ini tidak dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru pada Tahun 2025. Adapun hasil pengukuran kinerja IK 7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian IK 7

IK 7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan BBRPPBKP Tahun 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	%Capaian thd Target 2029
-	-	-	-	80	97,5	120	-	80	121,88

Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 80. Realisasi capaian kinerja sebesar 97,5, sehingga persentase kinerja mencapai 120% terhadap target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan BMN telah melampaui target yang

direncanakan dan mencerminkan tingkat kepatuhan yang sangat baik.

Selain itu, realisasi kinerja tahun 2025 juga telah melampaui target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 80%, dengan persentase capaian terhadap target 2029 mencapai 121,88%, yang mengindikasikan kinerja pengelolaan BMN berada pada jalur yang sangat baik dan berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan satuan kerja di lingkup BPPSDMKP yang memiliki indikator kinerja sejenis, yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), dengan target yang sama sebesar 80, capaian kinerja BBRP2BKP pada tahun 2025 mencapai 97,5, sedangkan capaian kinerja BBRSEKP mencapai 95, sehingga capaian BBRP2BKP relatif lebih tinggi dibandingkan BBRSEKP.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK ini antara lain adanya komitmen yang tinggi dari Plt. Kepala BBRP2BKP beserta penanggung jawab IK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, dukungan berbasis anggaran juga berperan penting dalam mendorong progres capaian indikator kinerja ini, melalui pengelolaan dan pengendalian BMN yang sistematis, konsisten, dan sesuai ketentuan. Program/kegiatan yang menunjang progress capaian IK ini diantaranya:

- Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026, pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2026.
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN baik ke pengguna barang dan pengelola barang.

- Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang.
- Melakukan penyusunan Laporan BMN (Semester dan Tahun) secara tepat waktu.
- Melakukan penyusunan/penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027.
- Melaksanakan pembahasan terkait pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) berupa gedung dan bangunan serta mesin dan kendaraan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Naratama pada tanggal 7 Oktober 2025, dalam rangka memastikan keberlanjutan fungsi, kondisi layak pakai, serta tertib pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 29. Pembahasan anggaran gedung dan bangunan.

Anggaran IK ini terdapat pada output/komponen “Layanan Penyelenggaraan Kearsipan” dengan pagu anggaran sebesar Rp0,- serta realisasi sebesar Rp0,- (100%).

Indikator Kinerja 8

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)

Kegiatan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Capaian kinerja IK

ini pada Tahun 2025 diukur menggunakan periode pengukuran triwulan. Layanan dukungan manajemen internal BBRP2BKP terdiri dari:

- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
- Layanan Umum
- Layanan Data dan Informasi
- Layanan Perkantoran
- Layanan Manajemen SDM
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- Layanan Manajemen Keuangan
- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
- Layanan Teknis

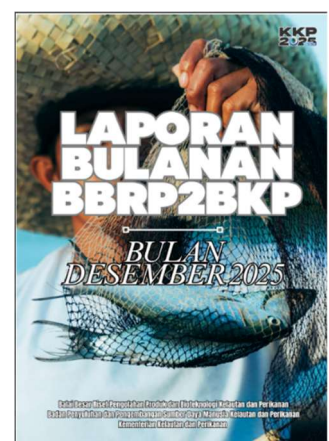
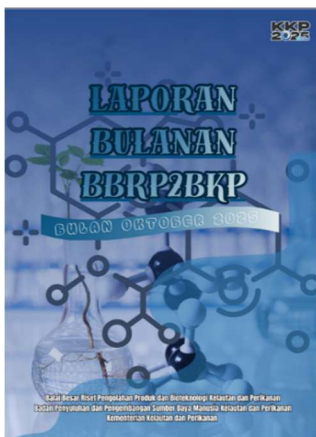
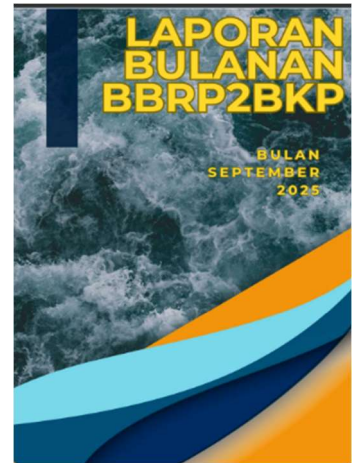
Adapun bukti capaian IK ini pada Tahun 2025 diperoleh dari dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker yang terdiri dari dokumen berupa dua belas Laporan Bulanan BBRP2BKP Tahun 2025 yaitu Laporan Bulan Januari-Desember; serta lima laporan kegiatan yaitu berupa Laporan Kegiatan Pembelajaran Taruna Berprestasi (PTB) Tahun 2025, Laporan Pelaksanaan Pelatihan Diversifikasi dan Pengemasan Produk Perikanan Berbasis *Zero Waste* Dalam Mendukung Program/ kegiatan *SMART Fisheries Village* (SFV) Desa Ngablak, Kabupaten Boyolali, Produk Inovasi dari Taruna Berprestasi Program Pembelajaran Taruna Berprestasi di BBRPPBKP, Laporan Kegiatan Analisis SWOT Pengembangan Program *SMART Fisheries Village* di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Laporan Penelitian Pelaksanaan Program Pembelajaran Taruna Berprestasi (PTB) Batch II di BBRP2BKP serta di Nota Dinas dari Kepala Sub Bagian Umum BBRP2BKP Nomor 7/BBRPPBKP/RC.610/I/2026 Tanggal 5 Januari 2026 perihal

Penyampaian Bukti Dukung Indikator Kinerja: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%).

Tabel 13. Capaian IK 8

IK 8. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)									
Realisasi TW IV 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan BBRPPBKP Tahun 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	%Capaian thd Target 2029
100	100	100	100	100	123,08	120	20	100	123,08

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja IK 8. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP, pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100, capaian kinerja meningkat menjadi 123,08 sebagaimana dapat dilihat pada tabel, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 120%. Dibandingkan dengan tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan layanan dukungan manajemen internal. Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 juga telah melampaui target jangka menengah tahun 2029, sebagaimana didukung oleh Nota Dinas Kepala Sub Bagian Umum kepada Plt. Kepala BBRP2BKP perihal Penyampaian Bukti Dukung Indikator Kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%) serta Data Rekapitulasi IK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Plt. Kepala BBRP2BKP.





Gambar 31. Bukti Dukung Capaian IK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)

Apabila dibandingkan dengan satuan kerja di lingkup BPPSDMKP yang memiliki indikator kinerja sejenis, yaitu Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, dengan target tahun yang sama sebesar 100, satuan kerja tersebut mencatat capaian sebesar 100 dengan persentase capaian 100%, sedangkan BBRP2BKP memperoleh capaian sebesar 121,43 dengan persentase capaian mencapai 120%, sehingga capaian kinerja BBRP2BKP relatif lebih tinggi dibandingkan satuan kerja pembanding.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK ini yaitu adanya komitmen yang tinggi dari Plt. Kepala BBRP2BKP untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta koordinasi yang intensif dengan penanggungjawab IK untuk menyajikan bukti dukung capaian IK berupa Laporan Bulanan BBRP2BKP secara rutin dari kegiatan layanan dukungan manajemen internal.

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian IK ini diantaranya:

- Melakukan penyusunan laporan mingguan setiap minggunya, untuk kegiatan manajerial dan Instruktur. Laporan mingguan ini dikompilasi dan difinalisasi menjadi Laporan Bulanan BBRP2BKP.
- Menyusun laporan pelaksanaan Pembelajaran Taruna Berprestasi (PTB) Tahun 2025
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dukungan SFV Desa Ngablak Tahun 2025
- Melaksanakan rapat internal untuk memonitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan BBRP2BKP.
- Melakukan koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan agar kegiatan berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku.
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Pusat Pendidikan KP, Pusat Penyuluhan, BP3 Tegal, dll)
- Menyampaikan Nota Dinas data dukung Penyampaian Bukti Dukung Indikator Kinerja: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%) dari Kepala Sub Bagian Umum kepada Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
- Melaksanakan rapat internal untuk memonitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan BBRP2BKP.



Gambar 32. Rapat Koordinasi Kegiatan BBRP2BKP

Faktor pendukung keberhasilan berbasis anggaran meliputi pelaksanaan pembayaran gaji pegawai BBRP2BKP, kegiatan pemusnahan arsip inaktif, pelaksanaan pengawasan kearsipan internal, penyusunan Laporan Pembelajaran Taruna Berprestasi (PTB) Tahun 2025, penyusunan laporan kegiatan dukungan di lokasi SFV Desa Ngablak, Boyolali, serta penyusunan Laporan Pemusnahan Arsip.

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan "Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Data dan Informasi serta Layanan Perkantoran" dengan pagu anggaran sebesar Rp6.874.704.000,- serta realisasi sebesar Rp6.810.794.141,- (99,07%).

3.3 Akuntabilitas Keuangan BBRP2BKP Tahun 2025

Realisasi anggaran BBRP2BKP sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp12.972.682.213,- (99.50%). Realisasi anggaran per jenis belanja disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Anggaran BBRP2BKP Tahun 2025

No	Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	6.874.704.000	6.810.794.141	99.07
2	Belanja Barang	6.163.396.000	6.161.888.072	99.98
Jumlah		13.038.100.000	12.972.682.213	99.50

Anggaran BBRP2BKP bersumber dari Rupiah Murni (RM) yang terdiri dari 2 (dua) jenis Belanja, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran BBRP2BKP sebesar Rp12.972.682.213,- (99.50%). Realisasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6.810.794.141,- (99.07%) dan belanja barang sebesar Rp6.161.888.072,- (99.98%). Anggaran pada belanja pegawai digunakan untuk keperluan belanja pegawai yaitu untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BBRP2BKP, serta belanja

barang digunakan untuk membiayai dukungan layanan manajemen BBRP2BKP.

Sasaran Kegiatan 1 yaitu Sasaran Kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”, memiliki pagu anggaran sebesar Rp13.038.100.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp12.972.682.213,- (99,50%).

Selanjutnya, realisasi anggaran per-Indikator Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025 disajikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Realisasi Anggaran per-Indikator Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA (%)	PAGU DATA SAKTI (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)	100	4.544.000	4.543.700	99,99
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	107,14	2.373.000	2.373.000	100
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)	102,44	0	-	0
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	120	0	-	0
		5 Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	104,11	0	-	0
		6 Persentase rencana umum pengadaan	120	6.156.479.000	6.154.971.372	99.98

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA (%)	PAGU DATA SAKTI (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
		PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)				
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)	120	0	-	0
		8 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	120	6.874.704.000	6.810.794.141	99.07
TOTAL				13.038.100.000	12.972.682.213	99.50

Sumber: Data SAKTI Kementerian Keuangan Tahun 2025

Upaya pencapaian kinerja BBRP2BKP pada Tahun 2025 telah dilakukan semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

3.4 Efisiensi Anggaran dan/atau Alokasi Sumber Daya BBRP2BKP Tahun 2025

- **Analisis Efisiensi Anggaran**

Berdasarkan KMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran, disebutkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu.

Selain itu, pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja

anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/ kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (*output*) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara persentase kinerja per IK dengan realisasi keuangannya. Adapun nilai minimum efisiensi adalah -20 dan nilai maksimum adalah +20. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi 'Monev Kemenkeu'.

Tabel 16. Perhitungan Efisiensi Anggaran BBRP2BKP Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KINERJA (%)	PAGU DATA SAKTI (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	EFESIENSI
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)	100	4.544.000	4.543.700	99,99	0,01
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	107,14	2.373.000	2.373.000	100	7,14
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)	102,44	0	-	0	20
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	120	0	-	0	20
		5	Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	104,11	0	-	0	20
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)	120	6.156.479.000	6.154.971.372	99,98	20
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)	120	0	-	0	20
		8	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	120	6.874.704.000	6.810.794.141	99,07	20
TOTAL				111,33	13.038.100.000	12.972.682.213	99,5	11,83

Sumber: Data SAKTI Kementerian Keuangan Tahun 2025

Dari tabel di atas, nilai efisiensi 20 terdapat pada IK 3, IK 4, IK 5, IK 6, IK 7, dan IK 8, yang menunjukkan bahwa pencapaian target pada

indikator-indikator tersebut pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara sangat efisien, baik melalui optimalisasi proses kerja maupun tanpa memerlukan dukungan anggaran secara langsung pada beberapa indikator.

Selanjutnya, nilai efisiensi 0,01 pada IK 1 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara sangat optimal dan efisien, dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dari pagu yang tersedia. Sementara itu, IK 2 menunjukkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 100% serta capaian kinerja yang melampaui target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, terdapat beberapa indikator kinerja dengan capaian sama dengan atau melebihi 100%, yaitu:

1. IK 1 "Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)", dengan target 85 dan capaian sebesar 85 dengan persentase capaian sebesar 100%.
2. IK 2 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)», dengan target" dengan target 92 dan capaian sebesar 98,57 dengan persentase capaian sebesar 107,14%.
3. IK 3 "Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)" dengan target 82 dan capaian sebesar 84 dengan persentase capaian sebesar 102,44%.
4. IK 4 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)" dengan target 71,50 dan capaian sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%.

5. IK 5 "Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)" dengan target 85 dan capaian sebesar 88,49 dengan persentase capaian sebesar 104,11%.
6. IK 6 "Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)" dengan target 80 dan capaian sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%.
7. IK 7 "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)" dengan target 80 dan capaian sebesar 97,50% dengan persentase capaian sebesar 120%.
8. IK 8 "Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)", target 100 dan capaian sebesar 121,43 dengan persentase capaian sebesar 120%.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan efisiensi ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan kembali secara detil kebutuhan per belanja, khususnya belanja pegawai sebagai proporsi anggaran terbesar agar cukup sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu proporsi anggaran BPPSDM untuk berkinerja;
2. Mencantumkan output kegiatan yang sekiranya sudah dapat diperoleh (khususnya pada RO dengan satuan Layanan) sehingga nilai efisiensi dari sasaran program pada NKA tidak tercatat minus sepanjang tahun (tidak berkinerja);
3. Melakukan pengecekan kembali informasi indikator kinerja pada aplikasi KRISNA dan Monev Kemenkeu untuk memastikan indikator dan target volume yang diinput tersaji pada aplikasi pengukuran (Monev Kemenkeu); dan

4. Melakukan pengawalan penyajian data kinerja yang update dan valid melalui kegiatan rekonsiliasi kinerja data NKA dan capaian output SAKTI secara berkala untuk menjaga nilai konsistensi capaian kinerja anggaran, dan melaporkan capaian output secara tepat waktu pada aplikasi SAKTI dan OMSPAN;
5. Meminimalisir terjadinya anomali data capaian output pada saat pengisian data di aplikasi SAKTI.

- **Analisis Alokasi Sumber Daya Manusia**

Secara keseluruhan, hingga akhir Tahun 2025 BBRP2BKP mempunyai 42 pegawai terdiri dari 23 pegawai (55%) berstatus PNS dan 19 pegawai (45%) berstatus PPPK.

Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 1 Mei 2025 satu pegawai BBRP2BKP, Syamdidi, S.Pi., M.App.Sc (Instruktur Ahli Madya), pindah ke Pusat Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal, sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 97/MEN-SJ/KP.431/IV/2025.

Pada bulan Juni 2025, sebanyak 19 pegawai BBRP2BKP pindah ke Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Surat Pelaksana Harian Sekretaris BPPSDM Nomor B.3895/BPPSDM.1/KP.430/V/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Pada bulan Agustus 2025, satu orang pegawai BBRP2BKP, Dimas Gondomarto Kusuma, S.E., M.AP. (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda), pindah ke Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan karena dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/MEN-SJ/KP.430/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025.

Pada bulan Agustus 2025 Jabatan Kasubag Umum BBRP2BKP yang semula kosong sudah terisi oleh Zilfia Nora, S.Pi., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Perencana Ahli Muda.

Pada bulan Oktober 2025 sebanyak 15 orang yang sebelumnya berstatus sebagai PPNP telah diangkat menjadi PPPK. Hal ini berdasarkan surat pengumuman Ketua Panitia Pengadaan CASN KKP Tahun Anggaran 2024 Nomor B.972/SJ/KP.320/IX/2024 tanggal 28 September 2025 tentang Pemanggilan Mulai Melaksanakan Tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Khusus dan Tenaga Kesehatan Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024.

Dari aspek kualifikasi pendidikan, pada Tahun 2025 pegawai BBRP2BKP sebanyak 42 orang berstatus ASN yang sudah berpendidikan S2 sebanyak 9 orang (21%), S1 sebanyak 16 orang (38%), Diploma sebanyak 7 orang (17%), SLTA sebanyak 9 orang (21%), dan SLTP 1 orang (2%). Pegawai ASN BBRP2BKP memangku Struktural 1 orang (Kasubag Umum), 14 orang memangku Jabatan Fungsional Tertentu dan 11 orang memangku jabatan Fungsional Umum.

Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dari analisis SDM BBRP2BKP adalah:

- Kelemahan utama terdapat pada masih terbatasnya SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi dan jabatan fungsional ahli.
- Tantangan kelembagaan muncul akibat mobilitas pegawai yang tinggi dan alih tugas ke unit kerja lain, yang berdampak pada kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum, SDM BBRP2BKP pada Tahun 2025 masih memiliki potensi yang kuat untuk mendukung transformasi kelembagaan. Namun, diperlukan langkah penguatan kapasitas pegawai, penataan struktur jabatan fungsional, dan strategi regenerasi tenaga teknis untuk

memastikan keberlanjutan fungsi kelembagaan dalam mendukung visi dan misi BPPSDMKP dan KKP.

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

A. Pembelajaran Taruna Berprestasi (PTB)

Pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan bertujuan untuk mempersiapkan calon lulusan memasuki dunia kerja kelautan dan perikanan dengan keterampilan, kompetensi, dan keahlian teknis yang diperlukan untuk karir tertentu. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menghasilkan calon lulusan sesuai dengan tujuan dimaksud, diantaranya pengembangan kurikulum yang sesuai kebutuhan dunia kerja, peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui sarana dan prasarana, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pengadaan pojok bursa atau bursa kerja melalui kerja sama yang dilakukan dengan dunia industri, dan meningkatkan *interpreunership* taruna melalui kegiatan kegiatan wirausaha. Salah satu cara yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) melalui Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kompetensi taruna berprestasi, optimalisasi sarana dan prasarana yang lengkap di Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) adalah perlu melakukan kegiatan magang di BBRP2BKP. Peserta magang adalah taruna berprestasi program studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH) Semester VI Politeknik AUP dan program studi Teknik Pengolahan Produk Perikanan/Pengolahan Hasil Laut (TPPP/PHL) semester IV Politeknik KP yang terdiri dari 16 orang, yang terdiri dari 4 laki-laki dan 12 perempuan.

Tujuan dari kegiatan PTB adalah meningkatkan kompetensi taruna berprestasi program studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

(TPH)/ Teknik Pengolahan Produk Perikanan (TPPP)/ Pengolahan Hasil Laut (PHL) untuk menghasilkan produk yang dapat diaplikasikan, serta optimalisasi sarana dan prasarana di BBRP2BKP.

Program Pembelajaran Taruna Berprestasi (PTB) dilaksanakan pada 13 Januari s.d. 30 Juni 2025, meliputi pembelajaran teori, magang di laboratorium dan pembuatan produk inovasi. Program PTB ini dibimbing oleh instruktur BBRP2BKP serta dosen pendamping dari Politeknik KP, dan didampingi oleh teknisi laboratorium BBRP2BKP.





Seminar Hasil dan Penutupan Program PTB Batch 2



Gambar 33. Kegiatan PTB Batch 2 di BBRP2BKP

B. Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2025. Pada acara tersebut BBRP2BKP mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai unit organisasi berpredikat 'Informatif'.



Gambar 34. Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras tim kehumasan BBRP2BKP, dan dukungan manajemen BBRP2BKP dalam pengelolaan informasi publik.

C. Pelatihan Diversifikasi dan Pengemasan Produk Perikanan Berbasis Zero Waste sebagai Upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMART Fisheries Village (SFV) Desa Ngablak, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan di sektor perikanan, BBRP2BKP melaksanakan Pelatihan Diversifikasi dan Pengemasan Produk Perikanan Berbasis Zero Waste secara *online*. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program *SMART Fisheries Village* (SFV) yang dikembangkan oleh BPPSDMKP melalui Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, serta dilaksanakan bersama BP3 Tegal sebagai wujud sinergi peningkatan kapasitas SDM di lokasi SFV Desa Ngablak, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali pada tanggal 9-12 September 2025. Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring diikuti oleh 30 peserta, yang terdiri atas kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar), pelaku UMKM, penyuluh perikanan, dan masyarakat sekitar, dengan mayoritas peserta adalah perempuan. Hal ini menunjukkan komitmen BBRP2BKP dalam mendorong kesetaraan peran dan akses perempuan dalam pengembangan ekonomi perikanan berbasis masyarakat.

Tabel 17. Data Terpilah Gender Peserta Pelatihan

No	Uraian	Jumlah Peserta (Orang)	Persentase (%)
1	Peserta Perempuan	28	93,3%
2	Peserta Laki-laki	2	6,7%
	Jumlah	30	100%

Komposisi peserta menunjukkan dominan perempuan (93,3%), mencerminkan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan pemberdayaan sektor pengolahan hasil perikanan. Tingginya keterlibatan perempuan mengindikasikan bahwa program pelatihan ini berkontribusi nyata terhadap implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Partisipasi laki-laki (6,7%) tetap penting sebagai bagian dari upaya kolaboratif dan inklusif, memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan peningkatan kapasitas SDM.

Kegiatan pelatihan berfokus pada diversifikasi olahan ikan berbasis zero waste, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta desain dan pengemasan produk sesuai standar keamanan pangan dan pasar. Salah satu praktik unggulan adalah pembuatan brownies tulang ikan lele, produk inovatif yang memanfaatkan limbah tulang sebagai sumber kalsium tinggi dan bernilai jual.



Gambar 35. Peserta sedang praktik membuat brownies tulang ikan lele

Selain itu, BBRP2BKP juga memberikan dukungan berupa rancangan desain kemasan untuk produk olahan seperti siomay ikan, wader crispy, basreng, dan brownies tulang ikan, dengan memperhatikan aspek estetika, label pangan, dan daya tarik pasar.



Gambar 36. Rancangan desain kemasan produk olahan ikan

Dari hasil evaluasi terhadap peserta diketahui ada peningkatan kompetensi peserta dengan kenaikan nilai rata-rata dari 83,7 menjadi 93,0. Secara keseluruhan, pelatihan ini berjalan efektif dan berdampak nyata dalam meningkatkan kapasitas perempuan pelaku usaha perikanan. Peserta menunjukkan perubahan pola pikir dari sekadar produsen tradisional menjadi pelaku usaha yang inovatif dan berorientasi keberlanjutan. Capaian ini menjadi kontribusi konkret BBRP2BKP dalam mendukung implementasi PUG, memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi biru yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

D. Penerimaan Penghargaan Evaluasi AKIP Level II

Pada kegiatan Rapat Pimpinan Koordinasi Perencanaan lingkup BPPSDMKP Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 19 September 2025 di Serpong, Tangerang, BBRPPBKP berhasil meraih Peringkat ke-2 Evaluasi AKIP Level II di lingkungan BPPSDMKP.

Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras Tim Program dan Monitoring, serta dukungan penuh manajemen BBRP2BKP dalam meningkatkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara berkelanjutan.



Gambar 37. Penerimaan Penghargaan Peringkat ke-2 Evaluasi AKIP Level II di lingkungan BPPSDMKP

E. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif

Pada kegiatan Rapat Pimpinan Koordinasi Perencanaan lingkup BPPSDMKP Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 19 September 2025 di Serpong, Tangerang, BBRPPBKP berhasil meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif lingkup BPPSDMKP. Capaian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi.



Gambar 38. Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif

F. Penilaian Arsiparis Kategori A (Memuaskan) Peringkat 11 Lingkup BPPSDM Dan Peringkat 42 Lingkup KKP

Pada 21 November 2025, telah disampaikan hasil Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, yang meliputi verifikasi dokumen data dukung pengawasan kearsipan oleh Tim Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, arsiparis memperoleh kategori A (memuaskan) dengan peringkat ke-11 di lingkup BPPSDM dan peringkat ke-42 di lingkup KKP.

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
73	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	61.94	26.25	88.19	A (MEMUASKAN)	42	11

Gambar 39. Hasil Penilaian Arsiparis Lingkup KKP

Capaian ini menunjukkan tertibnya pengelolaan arsip serta penerapan sistem kearsipan yang sesuai dengan ketentuan, sehingga mendukung ketersediaan arsip yang autentik, andal, dan mudah diakses. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat mendorong

penguatan tata kelola kearsipan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna menunjang efektivitas administrasi

IV. PENUTUP

4.1 Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025, BBRP2BKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Kegiatan dan 8 Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja BBRP2BKP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan capaian kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **111,33 (ISTIMEWA)** sebagaimana dashboard Kinerjaku berikut:



Gambar 40. Dashboard Kinerjaku BBRP2KP Tahun 2025

Pada Tahun 2025, dari 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

1. IK 1 "Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)", dengan target 85 dan capaian sebesar 85 dengan persentase capaian sebesar 100%.

2. IK 2 “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)», dengan target“ dengan target 92 dan capaian sebesar 98,57 dengan persentase capaian sebesar 107,14%.
3. IK 3 “Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)” dengan target 82 dan capaian sebesar 84 dengan persentase capaian sebesar 102,44%.
4. IK 4 “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)” dengan target 71,50 dan capaian sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%.
5. IK 5 “Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)” dengan target 85 dan capaian sebesar 88,49 dengan persentase capaian sebesar 104,11%.
6. IK 6 “Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)” dengan target 80 dan capaian sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%.
7. IK 7 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)” dengan target 80 dan capaian sebesar 97,50% dengan persentase capaian sebesar 120%.
8. IK 8 “Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)”, target 100 dan capaian sebesar 121,43 dengan persentase capaian sebesar 120%.

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Meskipun capaian kinerja BBRP2BKP Tahun 2025 tergolong “Istimewa”, pemantauan kinerja secara berkala tetap perlu dilakukan untuk memastikan seluruh Indikator Kinerja dapat direalisasikan secara konsisten sesuai target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut, diperlukan monitoring rutin terhadap indikator kinerja, penguatan koordinasi antar unit, serta pemanfaatan hasil evaluasi

sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada Tahun 2026. Ke depan, upaya perubahan akan difokuskan pada peningkatan capaian kinerja melalui penajaman prioritas program/kegiatan yang berdampak langsung terhadap IKU BBRP2BKP, penguatan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, serta pengendalian berbasis data secara berkala untuk mengantisipasi deviasi sejak dini. Dalam kerangka efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya yang tersedia dilakukan melalui realokasi/revisi internal pada kegiatan dengan daya ungkit tinggi, pengendalian belanja operasional, dan pemanfaatan maksimal sarana prasarana yang telah ada, sehingga kinerja BBRP2BKP tetap meningkat secara terukur, efektif, dan berkelanjutan tanpa menambah beban anggaran yang signifikan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025 (24 Januari 2025)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Langgeng Nurdiansah**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Besar Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan

Langgeng Nurdiansah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)	85
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	92
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)	82
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	71,5
		5 Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	85
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)	80
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)	80
		8 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	100

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Rp16.100.000.000
Total Anggaran BBRP2BKP Tahun 2025		Rp16.100.000.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Besar Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan



Langgeng Nurdiansah

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025 Revisi 2(11 Agustus 2025)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Langgeng Nurdiansah**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan

Langgeng Nurdiansah

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris BPPSDMKP	
2.	Ketua Tim Kerja Program, Sekretariat	
3.	Ketua Tim Kerja Dukman BBRP2BKP	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)	85
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)	82
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	85
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)	80
		8	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	100

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Rp14.764.704.000
Total Anggaran BBRP2BKP Tahun 2025		Rp14.764.704.000

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan


Langgeng Nurdiansah

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025 Revisi 3 (4 Desember 2025)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Cica Sugiarti**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Besar Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Cica Sugiarti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBRP2BKP (%)	85
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BBRP2BKP (Nilai)	82
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	85
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRP2BKP (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRP2BKP (%)	80
		8	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	100

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Rp13.038.100.000
Total Anggaran BBRP2BKP Tahun 2025		Rp13.038.100.000

Jakarta, 4 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Besar Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Cica Sugiarti

Lampiran 4. Surat Tugas tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN KS. TUBUN PETAMBURAN VI, JAKARTA 10260
TELEPON (021) 53650157, 53650158 FAKSIMILE (021) 53650158
LAMAM <https://kkp.go.id> POS ELEKTRONIK pproduk.biotech@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: B.21/BBRPPBKP/KP.440/I/2025

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, perlu membentuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, perlu ditetapkan Surat Tugas tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan;
- Dasar** : 1. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Nomor: SP DIPA - 032.12.2.403835/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Memberi Tugas

- Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran sebagai Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Surat Tugas ini.
- Untuk : Melaksanakan uraian tugas terkait kegiatan yang terlampir;

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Jakarta, 3 Januari 2025
Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan
Produk dan Bioteknologi Kelautan
dan Perikanan,



Langgeng Nurdiansah

**TIM PENGELOLAAN KINERJA
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025**

I. Uraian Tugas

Melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) Tahun 2025 yang meliputi kegiatan pengukuran dan pelaporan kinerja. Masa kerja Tim Pengelolaan Kinerja BBRP2BKP terhitung mulai sejak Surat Tugas ini dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Anggaran Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.

II. Penanggung Jawab, dan Pelaksana Tim Tata Kelola Kinerja

Penanggung Jawab, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Pelaksana, yang terdiri dari:

- **Ketua**, mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan verifikasi kinerja organisasi di lingkungan kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.
- **Manajer Kinerja**, mengoordinasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan verifikasi kinerja organisasi di lingkungan unit kerja yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan.
- **Sub-Tim Perencanaan Kinerja**, yang bertugas :
 - a. Memastikan bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja telah tersusun dan memuat:
 - 1) visi, misi, dan program;
 - 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan, dan target;
 - 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan; dan
 - 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - b. Memastikan bahwa Indikator Kinerja:
 - 1) digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, baik indikator kinerja level I maupun level II;
 - 2) Indikator Kinerja eselon I telah selaras dengan IKU;
 - 3) Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan

- 4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi.
- c. Memastikan bahwa dokumen kontrak kinerja memuat:
 - 1) Perjanjian Kinerja (PK):
 - a) tersusun dan selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
 - b) memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) peta strategi;
 - 3) rincian target IKU secara bulanan/ triwulanan/ semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU;
 - 4) matriks cascading kinerja organisasi level 1 sampai dengan level 2;
 - 5) pohon kinerja level 1 sampai dengan level 2;
 - 6) inisiatif strategi/rencana aksi atas PK.
- d. Memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja organisasi yang telah ditetapkan dan memastikan perubahan rencana aksi jika perjanjian kinerja organisasi mengalami perubahan;
- e. Memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
- f. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing; dan g. Mereviu dokumen rencana strategis dan rencana kinerja tahunan/rencana kerja yang paling sedikit memuat:
 - 1) Turunan visi, misi, dan program KKP;
 - 2) Tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja, tujuan dan target; dan
 - 3) Sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan.
- **Sub-Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja**, yang bertugas :
 - a. Menyusun mekanisme pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja organisasi;
 - b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/ semesteran/tahunan);
 - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diunggah kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan / triwulanan / semesteran /tahunan);
 - f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/ data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - h. Memastikan LKj yang disusun disampaikan tepat waktu dan di unggah ke dalam website resmi; dan
 - i. Mengoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

- **Sub-Tim Evaluasi Kinerja**, yang bertugas :
 - a. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - b. Menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - c. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan;
 - d. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan; dan
 - e. Mengoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

Adapun susunan keanggotaan tim pengelolaan kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Langgeng Nurdiansah, S.P, M.Si Pit. Kepala BBRP2BKP	Penanggung Jawab
2	Cica Sugiarti, SE, MM Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	Ketua
3	Zilfia Nora, M.Si Perencana Ahli Muda	Manajer Kinerja
4	Delima Agustina, S.St.Pi Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota Sub Tim Evaluasi Kinerja
5	Muthia Khelfa Pramesti, S.Si Pengelola Program dan Anggaran	Anggota Sub Tim Perencanaan Kinerja
6	Nur Fadli Fauziah, S.KM. Pengelola Anggaran	Anggota Sub Tim Perencanaan Kinerja

Jakarta, 3 Januari 2025

Pit. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan
Produk dan Bioteknologi Kelautan
dan Perikanan,



Langgeng Nurdiansah

Lampiran 5. Link Bukti Dukung Capaian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2025

https://bit.ly/DadukBBRPPBKP_TWIV_2025

BBRP2BKP

Jl. KS. Tubun Petamburan VI, Jakarta Pusat

Telp. +62 (021) 53650157



@bbrp2bcp_bppsdm



BBRP2BKP



bbrp2bcp



bppsdm_bbrp2bcp



bppsdm_bbrp2bcp



bppsdm_bbrp2bcp